

ADVOKASI OLEH GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2017-2022

ADVOCACY BY THE MeToo MOVEMENT ON SEXUAL VIOLENCE POLICIES IN UNITED STATES IN 2017-2022

SKRIPSI

Oleh:

Milka Frienta Ginting

NIM 190910101138

HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2023



ADVOKASI OLEH GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2017-2022

ADVOCACY BY THE MeToo MOVEMENT ON SEXUAL VIOLENCE POLICIES IN UNITED STATES IN 2017-2022

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Milka Frienta Ginting
NIM 190910101138

HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERSEMBAHAN

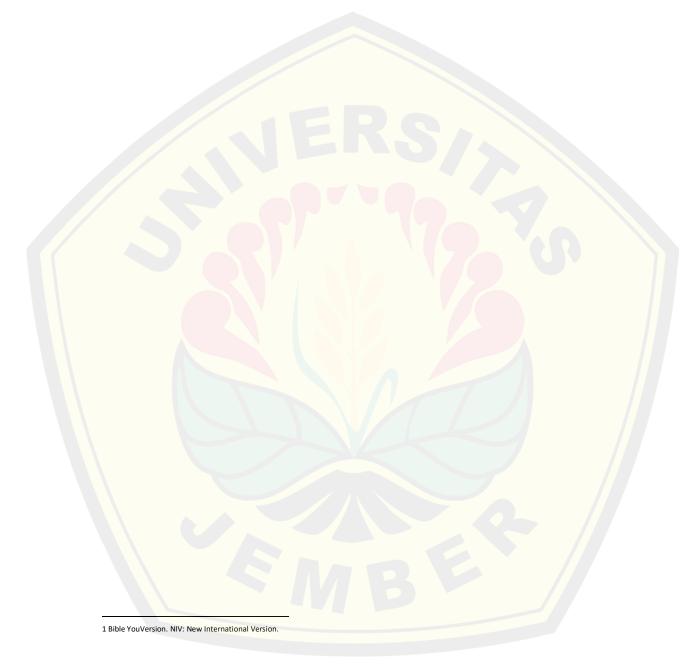
Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Orang tua tercinta, Ibu Marlena Sembiring dan Bapak Zia Ginting atas segala doa, dukungan, perhatian dan kepercayaan kepada penulis dalam meraih citacita.
- 2. Dosen Pembimbing Utama dan Anggota, Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A dan Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 3. Almamater Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai tempat berproses menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
- 4. Adik-adik terkasih, Beta Eliyona Ginting dan Efrata Sehkatanta Ginting atas doa, dukungan, dan hiburan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- 5. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, Ni Putu Ayu, Ni Kadek Sinta, dan teman-teman Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2019.
- 6. Kak Tekang dan Bang Aiko atas segala bentuk dukungan dan nasihat yang disampaikan kepada penulis.
- 7. Teman-teman pejuang skripsi sekaligus rekan dalam bertukar pikiran, Amelinda, Putri Kirana, Nandana, dan Ulil atas dukungan dan nasihat dalam mendiskusikan pembahasan penelitian. *Grateful to have you!*
- 8. *Enjoy Ent*, Rena, Sasa, Thallah, Putri, Citra, Azka, dan Vero atas semua dukungan, motivasi dan hiburan yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
- 9. *Mekdi*, Anggita, Dhea, dan Patricya atas eksistensinya dalam berusaha untuk mendukung dan menghibur penulis sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP).

MOTO

"Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding;
In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight

(Proverbs 3: 5-6)"



iv

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Milka Frienta Ginting

NIM: 190910101138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Advokasi oleh Gerakan MeToo pada Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Amerika Serikat pada Tahun 2017-2022" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2023 Yang Menyatakan,

Milka Frienta Ginting NIM 190910101138

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ADVOKASI OLEH GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2017-2022

ADVOCACY BY THE MeToo MOVEMENT ON SEXUAL VIOLENCE POLICIES IN UNITED STATES IN 2017-2022

Oleh:

Milka Frienta Ginting

NIM 190910101138

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D

RINGKASAN

Advokasi oleh Gerakan MeToo pada Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Amerika Serikat pada Tahun 2017-2022; Milka Frienta Ginting, 190910101138; 2023; 56 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Isu hak asasi manusia (human rights), semakin menjadi perhatian utama negara-negara dunia, termasuk Amerika Serikat. Dengan menganut konsep American Dream, Amerika menerapkan anggapan dalam lingkungan sosial bahwa kehidupan di Amerika lebih baik. Melalui konsep American Dream, memberikan cita-cita yang memungkinkan masyarakat Amerika memiliki kesetaraan yang sama dalam mendapatkan kesempatan aspirasi dalam mencapai suatu tujuan. Namun, Upaya tersebut masih belum berhasil terealisasi karena berbagai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar masyarakat, salah satunya adalah kejahatan berbasis gender.

Adanya kejahatan berbasis gender menjadi salah satu bentuk masalah yang menunjukan bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya oleh negara atau pemerintah. Era globalisasi saat ini mendorong masyarakat untuk menjadi aktor yang berperan dalam memperjuangkan perubahan dalam membentuk tananan yang aman dan sesuai dengan tujuan masyarakat umum. Sebagai salah satu negara besar dan maju, Amerika Serikat belum berhasil melindungi masayarakat dari kejahatan berbasis gender yang kemudian mendorong masyarakat menyuarakan kepentingan mengenai masalah berbasis gender melalui berbagai gerakan sosial, salah satunya Gerakan MeToo. Adanya kehadiran Gerakan MeToo ditengah masyarakat Amerika Serikat berhasil mendapatkan banyak atensi, hal ini kemudian mempengaruhi perubahan konstruksi sosial dan mampu mempengaruhi berbagai kebijakan di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Gerakan MeToo dalam menghadapi dan menangani permasalahan kejahatan berbasis gender melalui perubahan kebijakan dan konstruksi sosial.

Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal, teori gerakan sosial baru, teori pembingkaian sosial media. Ketiga teori tersebut berkaitan dengan Gerakan MeToo yang mengampanyekan isu kontemporer (isu gender) dengan upaya ekspansi gerakan melalui pembingkaian sosial media. Dalam konteks MeToo, gerakan ini merupakan gerakan sosial baru yang menganut isu kontemporer (isu kekerasan seksual) dengan konsep feminisme liberal. Gerakan MeToo melakukan ekspansi gerakan dengan menggunakan konsep pembingkaian sosial media. Melalui sosial media, MeToo membingkai informasi yang digunakan untuk mengampanyekan advokasi gerakan sekaligus mempengaruhi cara berpikir dan pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan melibatkan aktivitas pendukung lainnya seperti pemilihan sumber data, pencatatan informasi hasil pengumpulan data, dan pengolahan informasi melalui analisis hasil sumber data penelitian. Dalam proses mengumpulkan sumber data penelitian, peneliti melakukan pengecekan data untuk memastikan validitas data melalui metode triangulasi. Metode triangulasi bertujuan untuk mendapatkan keabsahan data dan yakin dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian.

Temuan penelitian ini adalah bahwa kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat mengalami beberapa pembaharuan yang dipengaruhi oleh meluasnya eksistensi Gerakan MeToo. Perubahan paling signifikan terjadi di lingkungan kerja Amerika Serikat, dibawah pengawasan EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) dan USCCR (United States Commission on Civil Rights). Hadirnya Gerakan MeToo, sudut pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual mulai berubah dan masyarakat Bersatu pendapat bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Advokasi oleh Gerakan MeToo pada Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Amerika Serikat pada Tahun 2017-2022". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skrispi penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A dan Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak kontribusi dan telah meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
- 3. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 5. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan waktu, kesabaran, dan keikhlasan memberikan pengalaman, ilmu, dan nasihat selama perkuliahan.

7. Segenap karyawan FISIP Universitas Jember yang telah membantu, memberikan arahan terkait pelayanan dan pengurusan administrasi selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Jember, 5 Juli 2023 Penulis, Milka Frienta Ginting NIM 190910101138

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTO	iv
PERNYATAAN	V
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Teori Feminisme Liberal (Liberal Feminism Theory)	8
2.1.2 Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement Theory)	11
2.1.3 Teori Pembingkaian Sosial Media (Framing Media Social Theory)	
2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian	
2.3 Tinjauan Studi Terdahulu	16
2.4 Ringkasan Penerapan Teori	20
BAB 3	
METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	, 21
3.2 Objek dan Fokus Penelitian	22

3.3	Pengumpulan Data Penelitian	23
3.4	Analisis Data	23
BAB 4		26
	KASI GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERAS	
	JAL	
4.1	Data Kasus Kekerasan Seksual	26
4.1	.1 Kekerasan Seksual di Sekolah	28
4.1	.2 Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja	29
4.2	Gerakan MeToo	32
4.2	2.1 Latar Belakang Gerakan MeToo	32
4.2	2.2 Respon Masyarakat Amerika Serikat terhadap Gerakan MeToo	33
4.2	2.3 Perubahan Konstruksi Sosial Masyarakat	35
4.3	Advokasi Kebijakan Gerakan MeToo di Amerika Serikat	36
4.3	3.1 Publikasi media (media publications)	41
4.3	3.2 Kerjasama (partnership)	41
4.3	3.3 Pendekatan komunitas (community approach)	42
4.3	.4 Jaringan global (global network)	43
4.4	Pengaruh Gerakan MeToo terhadap Kebijakan Penanganan Kekerasan	
Seksı	ualual	44
4.4	.1 Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Amerika Serikat	44
4.4	.2 Penanganan Kekerasan Seksual	46
BAB 5		51
PENUT	CUP	51
5.1 K	esimpulan	51
5.2 S	aran	52
DAFTA	D DIICTAKA	5.4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (human rights), semakin menjadi perhatian utama negara-negara dunia. Kesetaraan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mengandung nilai global untuk mencapai masyarakat yang damai dalam proses pembangunan berkelanjutan (Nations, Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet: Gender Equality, 2023). Salah satu contoh bentuk atensi internasional terhadap isu kesetaraan gender ialah penanganan kekerasan seksual oleh pemerintah negara. Saat ini, pencegahan dan penenganan kekerasan seksual sudah meluas sebagai fokus urgensi di banyak negara, salah satunya di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan kebudayaan individualistik. Budaya individulistik di Amerika mengandung 2 (dua) nilai penting yang yaitu kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom) (Mahrudi, 2022). Nilai ini diterapkan dengan upaya untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial tanpa mendiskriminasi karakteristik seperti ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Berdasarkan nilai-nilai dan konsep sosial yang dianut, Amerika Serikat berupaya untuk menjadi negara yang aman bagi masyarakat, baik bagi penduduk asli maupun penduduk pendatang.

Sebagai salah satu negara besar yang memiliki pengaruh kuat, Amerika mampu mempengaruhi perubahan-perubahan secara global termasuk ekspor nilai-nilai global seperti demokrasi, hak asasi manusia (human rights), dan kesetaraan (equality). Tidak hanya dalam aspek politik, Amerika Serikat juga memiliki peran dalam mempengaruhi lingkungan global melalui aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Dalam lingkungan sosial, Amerika Serikat menerapkan konsep "American Dream" atau anggapan yang menggambarkan bahwa kehidupan sosial di Amerika lebih baik. Mengacu pada Oxford English Dictionary, "American Dream" didefinisikan sebagai cita-cita yang

memungkinkan masyarakat Amerika memiliki kesetaraan yang sama dalam mendapatkan kesempatan aspirasi dan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam kata lain, konsep "American Dream" meyakinkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di Amerika tanpa melihat kasta, ras, warna kulit, agama, bahasa, dan gender (Batta & Baghwar, 2021)

Namun, upaya-upaya tersebut masih belum berhasil terealisasikan karena berbagai permasalahan yang mengakibatkan kesenjangan antar masyarakat, salah satunya adalah kejahatan berbasis gender. Kejahatan berbasis gender mencakup kekerasan seksual (sexual violence), pelecehan seksual (sexual harassment), penyerangan seksual (sexual assault), intimidasi seksual (sexual bullying), dan diskriminasi seksual (sexual discrimination) (Zhafarina, Anditya, & Anisah, 2022). Mengacu pada kejahatan berbasis gender, siapapun dapat mengalami dan melakukan tindakan tersebut. Di lingkungan masyarakat Amerika Serikat, tindak kejahatan berbasis gender dapat terjadi dimana saja, seperti sekolah, tempat kerja, tempat umum, jalan, bahkan tempat pribadi seperti rumah.

Permasalahan berbasis gender merupakan dorongan bagi *United Nations* (UN) dalam mewujudkan kesetaraan gender, yang dibentuk sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia internasional. UN menjadikan kesetaraan gender sebagai rencana aksi dunia melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dibentuk dan disepakati oleh berbagai pimpinan negara dalam mengupayakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, negara-negara anggota UN menetapkan *The Sustainable Development Agenda* pada tahun 2030 sebagai tenggat waktu tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, sampai saat ini proses perkembangan masih sangat kurang dan bahkan belum sesuai dengan rencana yang sudah di rancangkan.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja. Berdasarkan sumber data *UN Women*, secara global terdapat sekitar 26 persen atau lebih 1 (satu)

dari 4 (empat) perempuan berusia ≥ 15 tahun, pernah mengalami baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual oleh pasangan atau orang terdekatnya (Nations, Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls, 2023). Hal ini diperkirakan karena berbagai bentuk penyebab pemicu kejahatan seperti adanya krisis kesehatan, iklim, dan krisis kemanusiaan secara global yang meningkatkan resiko adanya kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak. Semakin meningkatnya kasus kejahatan berbasis gender, *UN Women* menyimpulkan bahwa proses saat ini sudah gagal untuk bergerak maju dan bahkan sudah mulai mengalami kemunduran. Adanya kemunduran ini dianggap menjadi penyebab adanya ancaman kebebasan dan perlindungan perempuan di lingkungan global. Hal tersebut diperkirakan karena berbagai faktor penghambat yaitu adanya pandemi akibat *Covid-19*, krisis iklim, dan meningkatnya ketidakamanan ekonomi dan politik. Mengacu pada kecenderungan global tersebut, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah kekerasan seksual.

Terdapat berbagai bentuk masalah yang menunjukan bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya oleh negara atau pemerintah. Masalah seperti kekerasan seksual, kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan lainnya. Era globalisasi mendorong masyarakat untuk menjadi aktor yang berperan dalam memperjuangkan perubahan dalam membentuk tatanan yang aman dan sesuai dengan tujuan masyarakat umum. Sebagai salah satu negara besar dan maju, Amerika Serikat belum berhasil melindungi masyarakat dari kejahatan berbasis gender yang kemudian mendorong masyarakat menyuarakan kepentingan mengenai masalah berbasis gender melalui berbagai gerakan sosial, salah satunya Gerakan MeToo.

Kehadiran Gerakan MeToo ditengah masyarakat mendapatkan banyak atensi. Gerakan MeToo sudah ada sejak tahun 2006 yang ditujukan kepada perempuan kulit berwarna (coklat dan hitam) yang menjadi penyintas kekerasan seksual di Amerika Serikat. Mengacu pada kejahatan seksual yang terus meningkat, Gerakan MeToo berhasil diikuti dan didukung oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan di Amerika

Serikat (Modrek & Chakalov, 2019). *MeToo Movement* bergerak dalam menentang berbagai bentuk kejahatan gender, seperti kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), dan intimidasi seksual (*sexual bullying*) (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Gerakan MeToo dikenal luas oleh publik sejak tahun 2017 melalui media sosial *Twitter* menggunakan tanda tagar #MeToo atau dalam Bahasa Indonesia disebut #AkuJuga sebagai bentuk koneksi satu sama lain dengan saling menceritakan pengalamannya. Tanda tagar tersebut digunakan sebagai cuitan *Twitter* oleh salah satu tokoh masyarakat Amerika Serikat, Alyssa Milano yang tertulis "If you've been sexually harassed or assaulted, write 'me too' as a reply to this tweet". Cuitan tersebut mendapatkan lebih dari ribuan balasan dari pengguna *Twitter* yang kemudian memperluas jaringan gerakan tersebut (Pflum, 2018).

Gerakan MeToo mendukung para penyintas kekerasan seksual dan membangun komunitas advokat yang digerakkan oleh para penyintas (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Gerakan ini mengupayakan untuk dapat membantu para penyintas kekerasan seksual pulih dari trauma dan depresi dengan melalui menceritakan pengalaman satu sama lain. Adanya gerakan ini merupakan salah satu bukti sosial bahwa negara tidak sepenuhnya mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Gerakan MeToo hadir sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan berbasis gender.

Salah satu tujuan Gerakan MeToo adalah untuk memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif dan efektif terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis gender di negara-negara bagian Amerika Serikat. Selain itu, gerakan ini juga mendemonstrasikan perluasan aturan mengenai pelanggaran, pelecehan, dan perlindungan penganiayaan. Melalui gerakan ini diharapkan mampu mengendalikan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan media massa sebagai wadah untuk menciptakan kesadaran dan kontrol pelecehan seksual terhadap perempuan. Gerakan MeToo merupakan salah satu bentuk mobilisasi yang terjadi

dalam rangka memperjuangkan tujuan-tujuan yang sama antar individu (Levy & Mattson, 2022).

Penggunaan sosial media yang tepat, memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi pengguna dalam memperluas cakupan informasi. Dalam perluasan koneksi Gerakan MeToo, sosial media berperan penting sebagai wadah publik untuk menyuarakan ketidakadilan sosial dan menyampaikan keluhan mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku (Shukla & Singh, 2020). Masyarakat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya melalui media sosial dengan konsep *framing* atau konsep pembingkaian informasi untuk mempengaruhi pembaca dalam memproses informasi terkait. Penggunaan konsep *framing* di sosial media lebih efektif dalam memperluas publikasi informasi kepada masyarakat. Dengan banyak bantuan pendukung, isu yang diangkat mampu mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang dituju. Selain itu, tujuan untuk menuntut adanya perubahan kebijakan dapat direalisasikan dengan jelas dan tepat.

Berdasarkan pemaparan mengenai korelasi Gerakan MeToo dengan isu permasalahan kejahatan berbasis gender di Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa MeToo merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam menangani permasalahan kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi hambatan negara dalam mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai analisis gerakan MeToo dalam mempengaruhi advokasi kebijakan dan perubahan peraturan terkait penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Atas urgensi advokasi kebijakan Gerakan MeToo yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat dalam menangani kekerasan seksual, maka tulisan ini mengambil judul:

"Advokasi oleh Gerakan MeToo pada Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2022"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah langkah awal dalam memulai pembahasan suatu penelitian. Adanya perumusan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan dan analisa dalam memperoleh kesimpulan dari suatu persoalan. Sebagai negara maju, Amerika Serikat memberikan harapan bagi masyarakat melalui "American Dream" dengan konsep kesetaraan dan kebebasan. Masalah kekerasan seksual yang terus terjadi menunjukan bahwa Amerika belum mampu mewujudkan cita-cita untuk memberikan kesetaraan hak manusia yang merata bagi seluruh masyarakat Amerika. Oleh karena itu, Gerakan #MeToo hadir sebagai salah satu bentuk gerakan sosial yang bertujuan untuk mendukung penyintas kejahatan berbasis gender. Penulis merumuskan pembahasan analisis permasalahan dengan mengaitkan isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan gerakan #MeToo merupakan bentuk upaya dalam membantu dan melindungi para penyintas kejahatan berbasis gender. Berdasarkan latar belakang tersebut, menunjukan bahwa meskipun Amerika Serikat berkomitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia (human rights), dan kesetaraan (equality), Amerika masih mengalami berbagai bentuk masalah. Maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini adalah: "Bagaimana advokasi Gerakan MeToo mempengaruhi kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Gerakan MeToo dalam menghadapi dan menangani permasalahan kejahatan berbasis gender melalui perubahan kebijakan dan konstruksi sosial. Penulis akan menjabarkan mengenai upaya Gerakan Me Too yang berhasil mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berlaku di Amerika Serikat. Perubahan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberhasilan Gerakan Me Too dalam memperjuangkan tindakan responsif pemerintah dalam menekan probabilitas terjadinya kejahatan berbasis gender berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penggunaannya sebagai sumber informasi publik yang berkaitan bagi studi Hubungan Internasional, khususnya terhadap gerakan sosial dan advokasi kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber perbandingan terhadap penelitian yang sejenis atau dijadikan bahan awal dalam melaksanakan penelitian lain mengenai gerakan sosial dan/atau kesetaraan gender. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu bagi pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai gerakan sosial berbasis isu advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual khususnya fokus lingkup Amerika Serikat. Melalui pembahasan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi para peminat ilmu hubungan internasional mengenai gerakan sosial baru (new social movement) dengan isu kontemporer.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Feminisme Liberal (*Liberal Feminism Theory*)

Penulis menggunakan konsep Feminisme Liberal sebagai alat bantu untuk menganalisis Gerakan MeToo dalam penanggulangan kekerasan seksual. Feminisme liberal merupakan pandangan yang menerapkan perempuan sebagai makhluk rasional dengan kemampuan yang sama seperti laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki (Guy-Evans, 2023). Dalam konteks tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam proses demokrasi dalam membantu keduanya untuk lebih setara. Mengacu pada definisi tersebut, feminisme liberal mampu membantu menganalisa isu kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Gerakan MeToo dengan fokus kekerasan seksual. Secara teoritis, feminisme liberal mengklaim bahwa perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, dan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki tidak didasarkan oleh biologis. Oleh sebab itu, perempuan dan laki-laki harus diperlakukan setara. Dalam kata lain, perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan dan kesempatan bekerja.

Feminisme liberal memiliki tujuan dan fokus permasalahan ditengah lingkungan masyarakat. Mengacu pada (Liberal Feminism: Definition & Theory, 2015), feminisme liberal bertujuan agar individu bisa menggunakan kemampuan mereka sendiri, termasuk didalam proses demokrasi negara. Hal ini juga bertujuan untuk membantu perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara di mata hukum, masyarakat, dan di lingkungan kerja. Secara politik, aktivis feminisme liberal di Amerika Serikat memfokuskan permasalahan diskriminasi gender dalam lingkungan kerja, seperti lapangan pekerjaan dan skala upah yang tidak adil. Selain itu, penempatan perempuan dalam posisi otoritas dalam profesi pemerintahan dan lembaga kebudayaan juga

mendorong aktivis feminisme liberal melawan diskriminasi gender melalui gerakan hak asasi sipil. Politik feminisme liberal menjadikan gerakan hak sipil sebagai bagian dari senjata untuk melawan ketidaksetaraan gender (gender inequality) melalui undang-undang anti diskriminasi dan tindakan afirmatif terutama di lingkungan pekerjaan. (Lorber, 1997)

Mengacu pada Gerakan MeToo, feminis liberal merupakan teori yang mengutamakan kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Feminis liberal melihat perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep ini menekankan perlunya kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam mendapatkan pendidikan dan memperjuangkan kesempatan hak sipil. Kaum feminis liberal menentang adanya diskriminasi seksual di bidang politik, ekonomi, sosial, dan termasuk personal. Namun, hal tersebut masih belum dapat terealisasi oleh negara karena kebijakan yang belum mampu melindungi kesejahteraan hak masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu, sering muncul tuntutan agar baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang setara.

Gerakan MeToo memiliki misi dan tujuan yang baik. Dengan memperjuangkan keadilan bagi penyintas kasus kejahatan berbasis gender, Gerakan MeToo memperkuat gerakan melalui dukungan dari masyarakat luas. Gerakan MeToo melalui sudut pandang feminisme liberal memfokuskan perjuangan perlindungan hukum melalui kebijakan-kebijakan yang berlaku dan perubahan baik undang-undang maupun hukum yang dianggap dapat menimbulkan adanya kesenjangan gender. Hal ini merupakan pandangan feminisme liberal bahwa persamaan hak perempuan dan laki-laki dapat terjamin pelaksanaannya apabila ditunjang dengan hukum yang kuat (Guy-Evans, 2023).

Kehadiran MeToo mendorong adanya dukungan kepada para penyintas yang kemudian mampu mempengaruhi konstruksi sosial dan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Memiliki tujuan untuk memberdayakan para penyintas yang

mengalami kekerasan seksual, MeToo menyadarkan para penyintas bahwa mereka tidak sendiri (Gordon, 2023). Pemberdayaan ini mendorong adanya perlawanan yang kemudian mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual. Mengacu pada hal tersebut, MeToo dapat dilihat sebagai dua kelompok konsep sosial yaitu gerakan sosial (social movement) dan kelompok kepentingan (interest group). Adapun persamaan yang dimiliki oleh kedua kelompok tersebut dengan MeToo adalah keduanya merupakan bentuk tindakan kolektif yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini memfokuskan pada tujuan MeToo untuk memberdayakan perempuan dan mengubah konstruksi sosial masyarakat mengenai pandangan terhadap kekerasan seksual.

Gerakan sosial dan kelompok kepentingan memiliki peran signifikan dalam menghubungkan masyarakat (citizens) dan pengambil keputusan (decision makers). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, gerakan sosial dan kelompok kepentingan memiliki perbedaan dalam struktur kelompok dan proses untuk mencapai tujuan (Johansson & Scaramuzzino, 2019). Pada umumnya, kelompok kepentingan merupakan organisasi formal yang berfokus pada isu-isu kebijakan atau kelompok tertentu. Selain itu, kelompok kepentingan dianggap sebagai bentuk organisasi dengan sistem sentralisasi. Sedangkan, gerakan sosial merupakan bentuk organisasi yang lebih terdesentralisasi dan kurang formal. Berbeda dengan kelompok kepentingan, gerakan sosial dibentuk sebagai jaringan kelompok dan organisasi yang memiliki cakupan lebih luas dengan menggunakan strategi baik konvensional maupun nonkonvensional.

Adapun tipologi perbedaan antara kelompok kepentingan dan gerakan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut (Johansson & Scaramuzzino, 2019):

	Kelompok Kepentingan	Gerakan Sosial
	(interest group)	(social movement)
Tujuan	Pengaruh politik	Pengaruh sosial dan pengaruh
		politik

Identitas atau	Kepentingan instrumental	Identitas sosial dan politik
Representasi		
Sumber Daya	Finansial, administratif, dan	Partisipasi masyarakat dan
	sumber profesional	aktivisme
Bentuk	Organisasi profesional	Jaringan (network)
Organisasi	(formal)	
Strategi	Konvensional (conventional)	Nonkonvensional (unconventional)
	dan orang dalam (insider)	dan konvensional

Berdasarkan pada perbedaan diatas, penelitian ini menggunakan pandangan gerakan sosial dalam menganalisis advokasi Gerakan MeToo. Definisi MeToo sebagai gerakan didukung oleh pernyataan Tarana Burke selaku pendiri MeToo dalam *Annual Final Report MeToo: Impact Report 2019* (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Pada laporan tersebut, Burke menyebutkan bahwa MeToo merupakan gerakan yang berhasil menarik perhatian publik terkait isu kekerasan seksual yang kemudian jaringan MeToo berekspansi menjadi organisasi internasional. Hal ini relevan dengan konteks gerakan sosial baru yang merupakan tindakan kolektif dan menggunakan strategi baik kovensional maupun nonkonvensional dalam mencapai tujuan.

2.1.2 Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement Theory)

Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan gerakan sosial yang melakukan pendekatan psikologi sosial terhadap individu sebagai pusat analisis. GSB merupakan bentuk aktifitas gerakan dan tindakan kolektif oleh para aktor non-negara dalam mengupayakan adanya perubahan terkait isu-isu kontemporer (Flynn, 2009). Dari sisi kajian teorisasi Hubungan Internasional, terdapat munculnya isu-isu kontemporer. Isu kontemporer berbeda dengan isu tradisional atau isu klasik yang sebelumnya membahas mengenai isu kemiskinan, buruh dan lainnya. Dalam pembahasan isu kontemporer, GSB muncul dengan isu-isu seperti isu lingkungan, isu hak asasi manusia (human rights), isu gender, dan lainnya. Pada umumnya, GSB berfokus pada

perubahan kultural dan perbaikan lingkungan baik secara sosial maupun fisik. Selain itu, GSB merupakan gerakan yang bersifat transnasional yang mendapatkan dukungan dari individu dengan berbagai latar belakang tanpa ada perbedaan kelas tertentu. Konteks tuntutan melalui suara masyarakat atau kelompok seringkali terjadi karena adanya ketidaksesuaian kebijakan yang ada dengan konteks masyarakat, dan bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Salah satu isu kontemporer GSB mengenai identitas yang saat ini berkembang luas di era globalisasi sekarang adalah isu kesetaraan gender (gender equality).

Gerakan MeToo merupakan salah satu gerakan internasional yang mengangkat isu gender yang berfokus pada kekerasan seksual. Bersifat transnasionalisme, Gerakan MeToo menjadi salah satu gerakan yang mengangkat isu publik melalui media sosial dan tanpa berkerumun di suatu tempat. Hal ini adalah salah satu faktor yang menjadikan dukungan yang diperoleh gerakan berasal dari berbagai latar belakang individu dan/atau kelompok, tanpa ada perbedaan kelas tertentu. Memiliki latar belakang tujuan yang sama seperti gerakan sosial pada umumnya, Gerakan MeToo mengupayakan adanya perubahan-perubahan melalui gerakan yang dilakukan terus menerus dalam mempengaruhi keputusan *high-stakes* yang berwenang.

2.1.3 Teori Pembingkaian Sosial Media (Framing Media Social Theory)

Era globalisasi saat ini menjadikan media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk konstruksi sosial realitas di tengah masyarakat. Realitas sosial merupakan hasil dari adanya konstruksi sosial yang muncul karena adanya komunikasi dengan orang lain (Berger & Luckmann, 1966). Proses penyampaian informasi dan isi berita akan mempengaruhi perspektif wartawan dalam menganalisis fakta dan aspek realitas yang kemudian akan mempengaruhi konstruksi sosial. Oleh karena itu, teori ini berperan untuk membantu menganalisa dan menjelaskan upaya MeToo dalam mengampanyekan advokasi. Dalam kampanye advokasi, media sosial sebagai wadah pembingkaian berita yang digunakan untuk membentuk sudut pandang pembaca terkait suatu peristiwa atau disebut sebagai *framing*.

Kemajuan teknologi mempermudah penyebaran informasi yang dikemas dalam berbagai bentuk yang disebut pembingkaian atau *framing*. Menurut Goffman, *frame* adalah suatu bentuk interpretasi yang digunakan untuk menempatkan dan mengidentifikasi suatu peristiwa ke dalam bentuk skema cara individu memandang hal tersebut (Goffman, 1974, p. 22). Goffman mengemukakan bahwa setiap individu menafsirkan segala sesuatu yang terjadi disekitar mereka melalui kerangka utama mereka (*primary framework*). Mengutip pada (Benford & Snow, 2023), Goffman melambangkan *frame* sebagai interpretasi skema yang memungkinkan individu untuk menemukan, merasakan, mengidentifikasi, dan melabeli kejadian dalam ruang hidup mereka (hlm. 614). Dengan demikian, mengacu pada GSB, *frame* berperan sebagai seperangkat keyakinan dan pemaknaan yang berorientasi pada tindakan yang menginspirasi dan meligitimasi aksi gerakan. Melalui *frame*-aksi kolektif, tindakan kampanye juga dilakukan untuk menggerakkan sekelompok orang sekaligus sebagai upaya untuk menegoisasikan pandangan dan sikap terhadap suatu persoalan (Benford & Snow, 2023).

Framing membantu kinerja suatu gerakan melalui bentuk aksi kolektif, yang disebut sebagai frame-aksi kolektif (Collective Action-Frame). Frame-aksi kolektif adalah seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tindakan yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan serta kampanye suatu organisasi gerakan sosial (Benford & Snow, 2023). Framing membantu efektivitas Gerakan MeToo. Secara umum, frame-aksi kolektif memiliki tiga tugas yang berperan sebagai bagian dari gerakan yaitu diagnostic framing, prognostic framing, dan motivational framing (Benford & Snow, 2023). Melalui framing, gerakan akan mengidentifikasi kondisi atau situasi masalah yang dianggap membutuhkan perubahan dan membuat atribusi mengenai siapa dan/atau apa yang harus disalahkan (diagnostic framing). Selain itu, framing juga berperan untuk menawarkan alternatif solusi dan rencana untuk menghadapi masalah serta strategi untuk melaksanakannya (prognostic framing). Terakhir, melalui framing, gerakan menyediakan alasan bagi para pengikut untuk tetap terlibat dalam gerakan

bersama dalam memperbaiki situasi dan mendukung satu sama lain melalui motivasi, seperti melalui *motivational quotes (motivational framing)*.

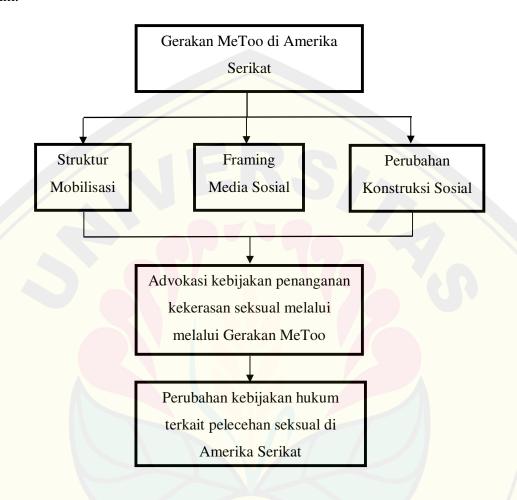
Dalam konteks *framing*, media sosial berperan penting dalam membingkai makna suatu peristiwa yang disampaikan kepada pembaca yang kemudian akan mempengaruhi sudut pandang pembaca terkait suatu peristiwa. Mengacu pada definisi *framing* menurut Entman (Entman, 1993, p. 52), *framing* memiliki komponen penting dalam membingkai suatu informasi yaitu memilih (*select*) dan menonjol (*salient*). Konsep *framing* adalah mengomunikasikan informasi dengan memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam mempromosikan suatu masalah tertentu. Selain itu, *framing* juga dapat memberikan rekomendasi tindakan korektif terkait permasalahan atau isu realitas yang terjadi. (Entman, 1993, p. 52)

2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

Gerakan MeToo mengacu pada isu feminis liberal yang mencakup pembahasan mengenai permasalahan gender. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun tidak dapat terselesaikan karena lemahnya penegakkan hukum yang terkait. Oleh karena itu, penyintas kekerasan seksual menyuarakan pengalamannya melalui gerakan MeToo untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Gerakan MeToo menyuarakan kesadaran masyarakat terutama perempuan, terkait penanganan kebijakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan membentuk advokat yang menuntut perubahan terkait ketimpangan perlindungan hukum terhadap para penyintas tindak kekerasan seksual.

Gerakan MeToo merupakan salah satu hasil dari transformasi gerakan sosial di ruang digital. Melalui sosial media, para aktivis dapat menyuarakan kepentingannya tanpa harus berkumpul di suatu tempat. Sosial media dimanfaatkan sebagai strategi *framing social* untuk melakukan komunikasi gerakan dengan tujuan untuk memperluas cakupan publikasi kepentingannya. Selain memperluas publikasi, Gerakan MeToo juga berhasil

menarik perhatian dan dukungan dari banyak lapisan masyarakat tanpa mengenal latar belakang. Oleh karena itu, Gerakan MeToo berhasil menjadi salah satu gerakan sosial baru yang mendominasi di Amerika Serikat dan masih terus berlangsung sampai saat ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023.

Mengacu pada pemaparan kerangka pemikiran operasional penelitian yang sudah dirangkum ke dalam Gambar 2.1, dapat ditarik informasi bahwa dalam perubahan kebijakan hukum terkait pelecehan seksual di Amerika Serikat melalui Gerakan

MeToo membutuhkan adanya struktur mobilisasi, *framing media social*, dan perubahan konstruksi sosial. Ketiga hal tersebut berkaitan satu sama lain dalam menghasilkan perubahan-perubahan kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu, Gerakan MeToo dapat disebut sebagai salah satu gerakan yang mampu mempengaruhi advokasi kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Gerakan MeToo berhasil memberikan perubahan terkait kebijakan melalui tindakan kolektif masyarakat terkait isu kekerasan seksual dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran terhadap kejahatan berbasis gender. Berdasarkan antusias dan usaha para aktivis, advokasi Gerakan MeToo berhasil mempengaruhi konstruksi sosial khususnya dalam membangun dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Adanya perubahan-perubahan ini mampu melindungi para penyintas dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kejahatan.

2.3 Tinjauan Studi Terdahulu

Penulisan penelitian ini mencantumkan beberapa studi terdahulu yang sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian untuk dijadikan acuan dalam proses penulisan yang sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti. Tinjauan studi terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa penelitian ini memiliki berbagai perbedaan dengan studi yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengacu pada 4 (empat) studi terdahulu dalam melakukan peninjauan penulisan yang membahas mengenai Gerakan MeToo yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Adapun studi terdahulu yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah Olivia Bernadeth (2019), Fenni Ratna Dewi (2019), Kitta Aquaillah (2021), dan Rifki Elindawati (2021).

Kajian pertama yang ditinjau oleh peneliti adalah karya tulis tahun 2019 oleh Olivia Bernadeth dengan judul *Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Ketidakadilan Berbasis Gender di Industri Film Hollywood* (Bernadeth, 2019). Penelitian ini membahas mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di industri film *Hollywood* dengan melihat aspek kondisi lingkungan kerja di belakang layar, pelecehan seksual, *pay gap*,

dan jumlah pekerja perempuan. Fokus penelitian ini mengkaji perubahan yang terjadi di industri film *Hollywood* pada Oktober 2017 sampai Oktober 2019 terkait pengaruh dari adanya Gerakan MeToo. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan diskusi mengenai pelecehan seksual dan kegiatan lainnya dalam meminimalisir jumlah kasus ketidakadilan berbasis gender di industri film *Hollywood* melalui Gerakan MeToo.

Kajian kedua adalah karya tulis tahun 2019 oleh Fenni Ratna Dewi dengan judul Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Perubahan Kebijakan tentang Pelecehan Seksual di Amerika Serikat tahun 2017-2019 (Dewi, 2019). Cakupan penelitian ini berfokus pada tahun 2017-2019 dalam membahas mengenai pengaruh Gerakan MeToo Amerika Serikat dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pelecehan seksual di AS. Penelitian ini mengidentifikasi proses pembentukan dan taktik Gerakan MeToo terkait upaya mempengaruhi perilaku negara dalam merespon permasalahan yang di advokasikan oleh gerakan. Hasil penelitian ini memaparkan mengenai pencapaian Gerakan MeToo dalam mempengaruhi negara, terutama mengenai perubahan kebijakan tentang kasus pelecehan seksual di tempat kerja.

Kajian ketiga adalah karya tulis tahun 2021 oleh Kitta Aquillah dengan judul *Gerakan Sosial dan Pembuatan Kebijakan (Studi Kasus: Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Amandemen the California Fair Employment and Housing Act tahun 2017)* (Aquillah, 2021). Penelitian ini membahas mengenai perubahan kebijakan yang diatur dalam FEHA (*Fair Employment and Housing Act*) pasca terjadinya Gerakan #MeToo. Perubahan kebijakan ini disebabkan oleh lemahnya kebijakan yang ada dalam menghukum pelaku kekerasan seksual di lingkungan kerja. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai perkembangan Gerakan MeToo dalam mempengaruhi kebijakan di California, khususnya kebijakan di lingkungan kerja sejak tahun 2017.

Kajian keempat adalah artikel jurnal tahun 2021 oleh Rifki Elindawati dengan judul Gerakan #MeToo sebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia (Elindawati, 2021). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Gerakan #MeToo muncul di Indonesia serta dampaknya terhadap perlawanan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan konsep pengaruh media sosial yang dikemukakan oleh Soares dan Joia. Melalui kebebasan perluasan informasi melalui media sosial, jangkauan pemberitaan kasus kekerasan seksual di masyarakat menjadi lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat dalam melawan kekerasan seksual. Penelitian ini juga memaparkan mengenai tanggapan masyarakat terhadap Gerakan #MeToo di Indonesia, baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif.

Olivia Bernadeth (2019)

Analisis berfokus pada perubahan yang terjadi di industri film Hollywood akibat pengaruh dari Gerakan #MeToo

Fenni Ratna Dewi (2019)

Analisis berfokus pada pengaruh Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi kebijakan terkait pelecehan seksual di AS pada tahun 2017-2019

Milka Frienta Ginting (2023)

Analisis

pada advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2022

berfokus

Kitta Aquillah (2021)

Analisis berfokus pada perubahan kebijakan di Amandemen FEHA, California pasca Gerakan #MeToo

Rifki Elindawati (2021)

Analisis berfokus pada dampak Gerakan #MeToo terhadap melawan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia

Gambar 2.3 Pemetaan Studi Terdahulu

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023.

Pada Gambar 2.2 memaparkan pemetaan secara singkat mengenai perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya berada pada fokus objek pembahasan penelitian. Penelitian studi terdahulu mengaitkan upaya dan perubahan yang terjadi pasca Gerakan #MeToo di berbagai aspek, seperti perubahan di industri film *Hollywood* (Bernadeth, 2019), pengaruh Gerakan #MeToo terhadap kebijakan pelecehan seksual di Amerika Serikat (Dewi, 2019), perubahan kebijakan Amandemen FEHA di California pasca Gerakan #MeToo (Aquillah, 2021), dan peran Gerakan #MeToo di Indonesia dalam melawan kekerasan seksual terhadap perempuan (Elindawati, 2021). Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat, mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial maupun politik pada tahun 2017-2022.

Disamping perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terdapat persamaan terkait topik pembahasan penelitian. Secara garis besar, keempat kajian studi terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai *outcome* dari Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi berbagai kebijakan dan perubahan yang terjadi di lingkungan negara. Namun, peneliti melihat bahwa pembahasan pada penelitian studi terdahulu berfokus pada perubahan yang terjadi dari Gerakan #MeToo pada berbagai aspek. Oleh karena itu, secara spesifik penulisan ini akan membahas mengenai konsep yang digunakan Gerakan MeToo dalam mempengaruhi advokasi kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tahun 2017 yaitu awal Gerakan MeToo dikenal luas oleh masyarakat sampai saat ini dengan menggunakan konsep *framing* di sosial media.

2.4 Ringkasan Penerapan Teori

Gerakan MeToo hadir sebagai gerakan yang membantu masyarakat untuk sadar bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang harus ditangani secara serius. Mengacu pada teori feminisme liberal, Gerakan MeToo memberikan kesadaran mengenai ketimpangan gender yang dialami oleh kaum perempuan berdasarkan perspektif sosial. MeToo mengampanyekan advokasi dengan memungkinkan masyarakat menyuarakan suara mereka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya masalah kekerasan seksual. Pengaruh MeToo di tengah masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah Amerika Serikat untuk menata kebijakan penanganan kekerasan seksual. Dalam kata lain, MeToo menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pembuat keputusan kebijakan.

Dalam praktik Gerakan MeToo sebagai salah satu bentuk Gerakan Sosial Baru, komunitas menggunakan media massa sebagai alat komunikasi untuk melakukan pengaruh di cakupan yang lebih luas. Berawal dari banyaknya penggunaan tagar (#) MeToo di media sosial, memberikan keberanian bagi banyak penyintas yang selama ini tidak mampu menceritakan pengalamannya kepada publik. Dalam usaha ekspansi pengaruhnya, Gerakan MeToo melakukan sosial media *framing* sebagai salah satu upaya membentuk cara pandang masyarakat. Strategi media sosial *framing* berhasil meningkatkan perhatian masyarakat terhadap tujuan dari gerakan ini. *Framing* Gerakan MeToo membentuk kesadaran masyarakat bahwa tidak satupun pantas dilecehkan. Selain itu, melalui gerakan ini masyarakat menjadi lebih sadar akan lemahnya aturan hukum yang mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Tingginya antusias masyarakat terhadap Gerakan MeToo mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perubahan terkait kebijakan penanganan kekerasan seksual.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis fenomena sosial dengan menggambarkan kehidupan dan gejala sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah (Sudaryono, 2017). Metode kualitatif menitik beratkan penelitian dengan cara penguraian (describing) dan pemahaman (understanding) terkait fenomena sosial yang diamati untuk diteliti. Penulisan penelitian kualitatif digunakan dengan upaya untuk mampu mengungkapkan dan memahami terjadinya suatu fenomena tertentu dengan menguraikan makna dari permasalahan tersebut. Sebagai esensi dari penelitian kualitatif, pemahaman tidak hanya dari sudut pandang peneliti, melainkan juga pemahaman terhadap fenomena dan fakta yang diamati berdasarkan perspektif subjek yang diteliti.

Penulisan penelitian ini menggunakan teori feminis liberal, teori gerakan sosial baru, dan teori *framing* dengan konsep pengaruh media sosial dalam membantu analisis. Peneliti memulai penulisan dengan memahami fenomena yang menjadi pusat penelitian melalui studi literatur dalam menganalisis gejala fenomena penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan pemeriksaan keterkaitan antara satu sumber dengan sumber lain sampai mampu menyimpulkan hasil informasi yang akurat. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penulisan bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena gerakan sosial baru di Amerika Serikat dalam mempengaruhi advokasi kebijakan melalui Gerakan MeToo. Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif akan membantu peneliti untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai peristiwa, situasi kegiatan, dan *output* yang terjadi dalam Gerakan #MeToo di Amerika Serikat melalui proses analisa triangulasi data dan interpretasi data untuk menyusun sebuah argumen.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Fungsi dari objek dan fokus penelitian adalah untuk membuat suatu pembahasan penelitian menjadi lebih fokus dan materi rumusah bahasan tidak melampaui batas tujuan dari penelitian itu sendiri. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Gerakan MeToo yang berperan dalam advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Fenomena sosial melalui Gerakan MeToo merupakan salah satu bentuk GSB dengan pemahaman feminis liberal. Oleh karena itu, fokus penelitian mengarah kepada bagaimana langkah dan upaya yang dilakukan melalui Gerakan MeToo dalam meningkatkan kesetaraan gender di AS melalui kebijakan penanganan kejahatan berbasis gender. Peneliti memfokuskan pada keterkaitan *output* dari Gerakan MeToo dengan perubahan kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual baik dalam lingkungan sosial maupun pemerintahan AS.

Batasan pembahasan yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 2 (dua) batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Batasan materi digunakan oleh peneliti untuk menentukan lingkup materi pembahasan suatu peristiwa yang dianalisis agar masalah tidak melebar dari topik utama permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan batasan waktu digunakan untuk menentukan periode waktu suatu fenomena sosial yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan membatasi materi pembahasan pada bagaimana upaya advokasi Gerakan MeToo mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Pembahasan penelitian mengenai *output* dari upaya Gerakan MeToo, dianalisis berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di ruang lingkup baik sosial maupun pemerintahan Amerika Serikat.

Mengacu pada batasan waktu, pembahasan memfokuskan penelitian pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Frasa 'Me Too' sudah ada sejak tahun 2006 yang dicetuskan oleh Tarana Burke. Namun, pembahasan penelitian ini membatasi waktu dari tahun 2017, yang merupakan awal mulanya Gerakan #MeToo dikenal luas oleh masyarakat melalui cuitan *Twitter* salah satu artis Amerika, Alyssa Milano. Kemudian sampai saat ini,

Gerakan #MeToo masih terus berlangsung dan sudah memberikan berbagai dampak positif terkait berbagai perubahan di lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup pembahasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai batasan akhir waktu pembahasan penelitian yaitu sampai tahun 2022. Penelitian ini akan menguraikan hasil analisis upaya Gerakan MeToo dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai dalam mempengaruhi advokasi kebijakan serta perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika Serikat.

3.3 Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan melibatkan aktivitas pendukung lainnya seperti pemilihan sumber data, pencatatan informasi hasil pengumpulan data, dan pengolahan informasi melalui analisis hasil sumber data penelitian. Hal penting dalam perolehan data penelitian kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi, bukan jumlah banyaknya sumber informasi. Untuk menghasilkan olahan informasi, data-data yang dikumpulkan merupakan sumbersumber literatur yang diperoleh dari laman situs resmi yang dikeluarkan baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, laporan yang dibuat oleh lembaga nasional maupun lembaga internasional, artikel ilmiah nasional dan internasional, jurnal nasional dan internasional, dan koleksi pribadi, berupa buku cetak dan buku elektronik (e-book).

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Proses analisis data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini bertujuan agar dapat menghasilkan sebuah analisis yang bersifat relevan dan akurat. Dalam menganalisis suatu data informasi yang dimaksudkan pada metode kualitatif adalah segala sumber data informasi baik tulis maupun lisan. Analisa sumber data dilakukan dengan interpretasi data untuk menyusun sebuah argumen yang akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab masalah penelitian mengacu pada fokus rumusan masalah. Proses penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari 3 (tiga) alur tahap

kegiatan yaitu tahap kondensasi data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Dalam proses mengumpulkan sumber data penelitian, peneliti melakukan pengecekan data untuk memastikan validitas data melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk mendapatkan validitas informasi dengan memeriksa kabsahan data melalui pemanfaatan data lain untuk memeriksa dan membandingkan sumber data satu dengan lainnya (Bachri, 2010). Penggunaan triangulasi bertujuan untuk mendapatkan keabsahan data dan yakin dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian. Dalam menyimpulkan penelitian diharuskan untuk memastikan kebenaran data melalui pembandingan sumber data, baik sumber data kualitatif maupun sumber data kuantitatif (Bachri, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis, membandingkan, dan memeriksa berbagai sumber data informasi untuk mendapatkan validitas data penelitian.

Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini akan memuat sistematika penelitian yang di dalamnya terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mengacu pada pengenalan topik yang akan dibahas secara singkat mengenai gambaran isu terkait latar belakang dari gerakan MeToo sebagai gerakan di Amerika Serikat sejak tahun 2017. Pembahasan pada bab ini akan mengulas gambaran permasalahan yang dirangkum dalam rumusan masalah penelitian sebagai inti dari kajian penelitian. Kemudian bab ini akan membahas mengenai tujuan yang mencakup alasan peneliti melakukan penelitian serta membahas manfaat penelitian bagi pembelajaran dan perkembangan ilmu hubungan internasional di masa depan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjabarkan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian yaitu Teori Feminisme Liberal (*Liberal Feminism Theory*),

Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement Theory), dan Teori Pembingkaian (Framing Theory). Kemudian untuk memberikan fokus sudut pandang yang berbeda dan memperkuat penelitian, bab ini akan membahas mengenai studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian. Akhir dari pembahasan bab ini mengacu pada ringkasan penerapan teori yang diikuti dengan argumen utama dan proposisi antara landasan teori dan masalah utama penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ketiga mengacu pada penguraian mengenai jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan objek dan fokus penelitian yang digunakan untuk membatasi peneliti dalam menetapkan batasan kajian. Bab ini akan membahas mengenai teknik pengumpulan dan analisis data yang mencakup penjabaran proses pengolahan informasi dalam mendapatkan data spesifik.

BAB 4 ADVOKASI GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab keempat akan membahas data dan kasus kekerasan seksual di Amerika Serikat serta memaparkan gambaran umum gerakan MeToo di Amerika Serikat. Kemudian bab ini akan membahas mengenai strategi gerakan dan advokasi kebijakan terkait perubahan penanganan kekerasan seksual Amerika Serikat dalam tahun 2017-2022.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab terakhir dari penelitian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran yang terdiri dari pernyataan singkat terkait hasil pembahasan yang sudah diuraikan. Kemudian pada bab ini akan memaparkan saran yang merupakan rekomendasi atas hasil pelaksanaan penelitian dalam mengatasi penyelesaian masalah yang ada. Kesimpulan dan saran merupakan penanda dari berakhirnya penelitian dari kajian skripsi ini.

BAB 4

ADVOKASI GERAKAN MeToo PADA KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

4.1 Data Kasus Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku dan tindakan seksual yang bersifat tidak diinginkan, dipaksa, dan dilakukan tanpa persetujuan seseorang oleh pelaku kekerasan. Istilah tindak kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan lainnya seperti penyerangan seksual, pelecehan seksual, *cyberviolence*², dan lain sebagainya. Isu tindak kekerasan seksual mengacu pada hak korban kekerasan seksual, dominasi kekuasaan, dan penghinaan akibat dari ketidakseimbangan kekuatan yang berasal dari ketidaksetaraan gender. Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, namun pada umumnya kekerasan seksual lebih sering terjadi kepada perempuan dan anak perempuan, transgender, dan *non-binary* (RAINN, 2023). Hal ini menjadi masalah yang dapat mempengaruhi penyintas dalam berbagai bentuk, seperti perubahan serangkaian emosional, masalah medis, trauma, perubahan tubuh seseorang dan *self-esteem*.

Di Amerika Serikat, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling mempengaruhi masyarakat Amerika. Menurut data RAINN (*Rape, Abuse & Incest National Network*), setiap 68 detik sekali masyarakat Amerika mengalami pelecehan seksual seperti siulan (*catcalling*)³, komentar seksual, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Mengacu pada hal tersebut, perempuan dan laki-laki memiliki resiko yang sama dalam mengalami kekerasan seksual seperti di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, dan bahkan di tempat lainnya seperti di dalam penjara dan di lingkungan militer. Berdasarkan data

² Cyberviolence adalah bentuk kejahatan melalui penggunaan internet atau teknologi digital untuk melakukan kekerasan, pelanggaran hak privasi, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan lainnya.

³ Melakukan siulan kepada orang lain dianggap sebagai pelecehan seksual di Amerika Serikat.

⁴ National Sexual Assault Hotline. RAINN.

RAINN⁵, masyarakat berusia muda memiliki resiko paling tinggi mengalami kekerasan seksual setiap tahunnya.

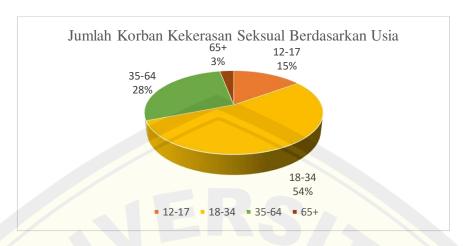


Diagram 4.1 Jumlah Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia di Amerika Serikat (Data dihimpun dari RAINN Victims of Sexual Violence: Statistics)

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia. Berdasarkan data pada diagram 4.1, mayoritas korban kekerasan seksual dialami oleh masyarakat yang berusia dibawah 30 tahun. Hal ini didukung oleh faktor lingkungan masyarakat Amerika Serikat dimana usia dibawah 30 tahun menjadi usia aktif masyarakat seperti pergi sekolah, les, kuliah, kerja dan lainnya, sehingga memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan usia diatas 30 tahun. Mengacu pada data RAINN *Victims of Sexual Violence: Statistics*, jumlah kekerasan seksual umum terjadi di sekolah dan di tempat kerja yang dialami oleh 1 dari 6 perempuan Amerika Serikat. Kekerasan seksual yang dialami oleh para korban dapat berupa pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan yang mayoritas menyerang perempuan berusia 16 sampai 19 tahun (RAINN, 2023). Sedangkan perempuan dewasa cenderung mengalami kekerasan seksual di tempat umum dan di tempat kerja. Namun, jumlah korban kekerasan seksual sulit diakumulasikan secara pasti karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Hal

_

⁵ Rape, Abuse & Incest National Network

ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa takut atau trauma yang dialami oleh korban.

Tindak kekerasan seksual mempengaruhi mental, materi, dan fisik korban. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), kekerasan seksual memberi dampak besar kepada sekian juta masyarakat di Amerika Serikat (CDC, 2023). Namun penelitian CDC menunjukan bahwa masih banyak penyintas atau korban yang tidak melaporkan kejahatan tersebut. Hal ini diperkirakan karena rasa malu dan takut yang dialami korban apabila melaporkan tindak kekerasan kepada polisi, teman, atau keluarga. Para penyintas juga berkemungkinan mengalami gangguan psikologis akibat trauma yang menyebabkan adanya pikiran untuk bunuh diri. Selain secara mental, para penyintas juga mengalami dampak fisik, seperti memar, infeksi menular, dan kehamilan (bagi perempuan). Mengacu pada kemungkinan dampak mental dan fisik para penyintas, data CDC menunjukan bahwa penyintas kekerasan seksual diperkiran membutuhkan biaya sebesar 122,461 USD per penyintas. Biaya ini diperlukan untuk dana pengobatan medis, dana kehilangan produktivitas, dana untuk pengadilan pidana dan keperluan lainnya (CDC, 2023).

4.1.1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Tidak hanya terjadi di lingkungan orang dewasa, kekerasan seksual juga bisa terjadi pada anak-anak yang berada di lingkungan sekolah. Pada tahun 2017, *Civil Rights Data Collection* (CRDC) mengeluarkan hasil data laporan survei yang mencakup hasil survei dari semua sekolah di setiap bagian distrik Amerika Serikat dengan judul "*Sexual Violence in K12 Schools*" (U.S Department of Education, 2020). Hasil data tersebut mengakumulasi kekerasan seksual di sekolah-sekolah bagian distrik Amerika Serikat dengan jumlah 9.649 korban pada tahun 2015-2016 dan 14.938 korban pada tahun 2017-2018 (U.S Department of Education, 2020). Data tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah kekerasan seksual di sekolah-sekolah Amerika Serikat sebanyak 55 persen. Menurut penelitian, tingginya jumlah persentase ini

disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam melaporkan kejahatan berbasis gender (U.S Department of Education, 2020).

Banyak lembaga yang ikut berpartisipasi dalam mendukung para penyintas di Amerika Serikat. Organisasi yang membantu penanganan serta pertolongan penyintas kekerasan seksual seperti RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dan EEOC (Equal Employment Opportunity Act). RAINN merupakan organisasi anti-kekerasan seksual di Amerika Serikat yang membantu penyintas kekerasan seksual untuk sembuh dari trauma dan tahap penyembuhan lainnya. Selain itu, RAINN melayani edukasi publik yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memahami kekerasan seksual. RAINN bekerja sama dengan media dan berbagai pihak lainnya untuk mendapatkan dan mampu menyediakan informasi akurat mengenai kekerasan seksual, pencegahan, penuntutan, dan penyembuhan penyintas di Amerika Serikat.

4.1.2 Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menjadi salah satu tempat yang memiliki kemungkinan paling tinggi terjadinya kekerasan seksual. Adanya struktur jabatan pekerja dan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja, menjadi salah satu penyebab kerap terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, terdapat organisasi yang menaungi lingkungan kerja dalam melindungi para pekerja. Berbeda dengan RAINN, EEOC merupakan organisasi pemerintah Amerika Serikat yang melakukan investigasi mengenai keluhan yang terjadi di lingkungan kerja. Pada umumnya, keluhan yang disampaikan oleh para pekerja berupa diskriminasi seperti diskriminasi ras, warna kulit, agama, identitas gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Bentuk diskriminasi paling umum dirasakan oleh pekerja perempuan seperti diskriminasi dengan tidak mendapat jumlah upah yang sama dengan laki-laki. EEOC memberlakukan *Title VII of the Civil Rights Act of 1964* (Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 *Title VII*), yang membahas mengenai larangan diskriminasi kerja berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal

kebangsaan. Mengacu pada hal tersebut, kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja merupakan salah satu bentuk diskriminasi jenis kelamin dan gender yang melanggar *Title VII of the Civil Rights Act of 1964*.

Penanganan kekerasan seksual masih sangat lemah dalam melindungi dan membantu penyintas kekerasan. Meskipun sudah menerapkan hukum melalui undang-undang, tindak kekerasan seksual masih sering terjadi dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Seringkali pihak perusahaan atau tempat kerja hanya meminta pelaku dan korban untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan (EEOC, 2022). Hal ini juga berkaitan dengan rasa khawatir akan reputasi perusahaan apabila permasalahan ditindaklanjuti lebih jauh. Sedangkan bagi korban, tidak melapor dikarenakan kurangnya kesadaran, adanya rasa takut untuk melapor, dan adanya perjanjian tertentu antara karyawan dan pemilik kerja (EEOC, 2022). Menurut data ILO (International Labour Organization), hanya setengah jumlah korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual dari jumlah korban secara keseluruhan (ILO, 2023). Secara global terdapat 6.3 persen pekerja perempuan dan laki-laki pernah mengalami kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Namun, masih banyak penyintas yang tidak mau melapor dengan alasan NDA (Non-Disclosure Agreement) dan khawatir akan reputasi mereka setelah melapor (ILO, 2023).

Kehadiran Gerakan MeToo di tengah masyarakat sangat membantu para penyintas kekerasan seksual. MeToo membantu kesadaran dan mendorong keberanian masyarakat. Sejak hadirnya Gerakan MeToo di Amerika Serikat pada tahun 2017, para penyintas mulai berani untuk melaporkan dan menuntut keadilan atas peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Menurut EEOC Data Highlight (April, 2022), pada *Fiscal Year (FY)* atau Tahun Fiskal 2018-2021, EEOC menerima jumlah sebanyak 98.411 dakwaan mengenai pelecehan dan 27.291 diantaranya merupakan dakwaan dugaan pelecehan seksual. Jumlah dakwaan tersebut meningkat selama dua tahun berturut-

turut pada tahun 2018 dan 2019, tepat sejak viralnya Gerakan MeToo di Oktober 2017 (EEOC, 2022).

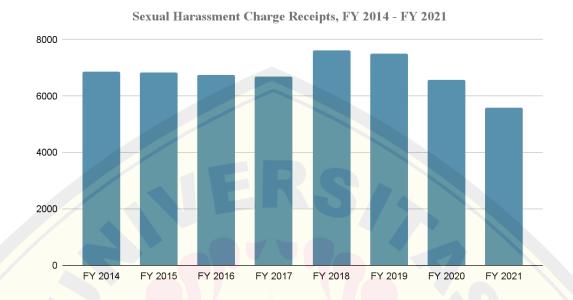


Diagram 4.2 Jumlah Dakwaan Kekerasan Seksual berdasarkan EEOC Data Highlight 2022

(Data dihimpun dari EEOC Data Highlight: Sexual Harassment in Our Nation's Workplace)

Berdasarkan Diagram 4.2, jumlah dakwaan kekerasan seksual di lingkungan kerja pada FY2018-FY2019 meningkat sejak viralnya Gerakan MeToo pada tahun 2017. Salah satu faktor meningkatnya jumlah tersebut adalah karena meningkatnya juga kesadaran masyarakat untuk tidak malu dan menyadari pentingnya melapor tindak kekerasan seksual. Peningkatan ini didorong oleh dukungan-dukungan yang diberikan oleh sesama penyintas dan juga masyarakat melalui Gerakan Metoo. Pada FY2018, jumlah dakwaan kekerasan seksual meningkat sebanyak 13.6 persen dibandingkan dengan FY2017. Perubahan ini bukan karena meningkatnya jumlah tindak kejahatan kekerasan seksual, melainkan adanya pemberdayaan yang dirasakan oleh para penyintas untuk berani melaporkan pelaku tindak kejahatan kepada lembaga berwenang. Sebelumnya, para penyintas merasa malu dan takut akan adanya pembalasan dari pelaku yang dilapor. Namun, MeToo berhasil menunjukkan kepada para penyintas untuk tidak perlu

takut melaporkan pelaku baik rekan maupun petinggi di tempat kerja yang melakukan tindak kekerasan seksual. Hal ini berkaitan dengan perubahan perspektif masyarakat. Sebelumnya, kekerasan seksual dianggap sebagai aib korban dan menyebabkan para penyintas takut untuk melapor karena menjaga reputasi diri. Namun, adanya dorongan dan dukungan dari masyarakat melalui Gerakan MeToo, para korban sudah berani untuk membuka suara.

4.2 Gerakan MeToo

4.2.1 Latar Belakang Gerakan MeToo

Gerakan sosial tidak lagi hanya membahas mengenai isu tradisional melainkan juga isu kontemporer. Isu kontemporer yang dimaksud ialah seperti isu hak-hak dan kesetararaan. Mengacu pada Gerakan MeToo, advokasi kampanye ini menyuarakan dorongan kepada para penyintas untuk sadar akan pentingnya melapor tindak kekerasan seksual. Isu yang diangkat melalui kampanye ini relevan dengan isu kontemporer yaitu mengenai hak-hak. Upaya advokasi untuk mendapatkan perlindungan melalui kebijakan hukum yang berlaku, mendorong MeToo dalam mencapai tujuan gerakan dengan memperluas cakupan dan atensi publik (Batool, 2019).

Gerakan MeToo merupakan Gerakan Sosial Baru (GSB). Gerakan ini didukung dengan aktifitas MeToo dan tindakan kolektif para aktor non-negara dalam mengupayakan adanya perubahan terkait isu-isu kontemporer (Flynn, 2009). Mengacu pada aktor non-negara, Gerakan MeToo pertama kali dicetuskan oleh Tarana Burke dengan tujuan untuk membantu para penyintas kekerasan seksual untuk terhubung dan memberikan dukungan satu sama lain (Carroll, 2020). Melalui pemahaman ini, Burke juga berharap memberikan pengaruh konstruksi sosial mengenai pemahaman kekerasan seksual yang selama ini dianggap sebagai aib. Melalui MeToo, Burke mengadvokasikan kampanye bahwa tidak seorangpun pantas menjadi korban kekerasan seksual dan berhak mendapatkan dukungan dan perlindungan dari masayarakat (Carroll, 2020).

Tindakan dan aktifitas kolektif yang dilakukan oleh MeToo merupakan bagian dari ciri GSB. Diawali dengan *tweet* aktris *Hollywood*, Alyssa Milano pada tahun 2017 melalui sosial media *Twitter*, MeToo mendapatkan perhatian publik dengan cepat (Pflum, 2018). Mengacu pada kecepatan informasi dan dukungan yang didapatkan MeToo melalui sosial media, Gerakan MeToo bersifat tindakan kolektif masyarakat secara tidak langsung (Batool, 2019).

4.2.2 Respon Masyarakat Amerika Serikat terhadap Gerakan MeToo

Gerakan MeToo melakukan upaya untuk mempengaruhi pandangan masyarakat melalui kampanye gerakan. Kampanye advokasi Gerakan MeToo adalah memungkinkan orang menyuarakan suara mereka untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah kekerasan seksual yang dihadapi oleh para penyintas. Gerakan MeToo di Amerika Serikat mendapat perhatian luas sejak Alyssa Milano, aktris Hollywood, mempengaruhi dan mengajak para penyintas kekerasan seksual untuk menceritakan pengalamannya di sosial media pada tahun 2017 (Pflum, 2018). Tindakan ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para penyintas bahwa mereka tidak sendiri dan menyadarkan masyarakat bahwa tidak ada yang pantas dilecehkan secara seksual (Pflum, 2018). Lima tahun sejak viralnya #MeToo, gerakan ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat terhadap topik kekerasan seksual yang sangat sensitif menjadi topik penting dengan tujuan melindungi dan mendukung para penyintas. Keberhasilan ini di lihat pada antusias masyarakat dan atensi publik terhadap motif dan kampanye advokasi MeToo. Edukasi melalui kampanye advokasi menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih berani dalam mengambil tindakan apabila mengalami kekerasan seksual.

Dalam rangka untuk memperluas cakupan layanan pertolongan, MeToo membentuk official website. Gerakan MeToo melakukan ekspansi melalui pembentukan website yang bertujuan untuk memperluas cakupan dan mempermudah cara dalam membantu banyak orang menemukan jati diri untuk sembuh dari traumanya (Me Too: Our Work, 2023). Sejak tahun 2020, MeToo Movement Website mengembangkan beberapa

program yang sekaligus membantu para penyintas yang terpaksa harus di rumah bersama pasangan pelaku tindak kekerasan karena kebijakan Pandemi Covid-19. Program melalui website tersebut mengutamakan kesembuhan para penyintas yang mengalami depresi dan trauma akibat lingkungan yang tidak aman, serta melakukan pelatihan bagi para penyintas untuk mencapai perubahan individu secara mental. Program-program MeToo Movement Website seperti Pelatihan Kepemimpinan Para Penyintas, Komunitas Penyembuhan, Rangkaian Penyembuhan Penyintas dan lainlain, tidak hanya mencakup masyarakat Amerika Serikat melainkan terbuka untuk internasional. Segala bentuk pertolongan melalui program tidak dikenakan biaya, sehingga semua orang mampu mendapatkan bantuan tanpa adanya batasan dan halangan.

Masyarakat Amerika Serikat memiliki ragam pandangan publik terkait bagaimana Gerakan MeToo mempengaruhi cara perempuan dan laki-laki berinteraksi. Beberapa pandangan mendukung Gerakan MeToo dengan menghargai atensi isu kesetaraan, dan beberapa menentang karena merasa menjadi lebih sulit berinteraksi dengan lawan jenis. Menurut *Pew Research Center*, empat dari sepuluh laki-laki mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan perempuan di tempat kerja sejak meningkatnya fokus kekerasan seksual (Brown, 2022). Sebaliknya, dua dari sepuluh perempuan merasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki di tempat kerja. Hasil dari survei nasional terhadap orang dewasa di Amerika Serikat tersebut juga mengklaim bahwa 46% dari 6.034 orang menyatakan tidak merasa adanya banyak perbedaan (Brown, 2022).

Besarnya atensi masayarakat terhadap Gerakan MeToo, mendukung para penyintas kekerasan seksual. Berdasarkan data *Pew Research Center*, dukungan dan antusias masyarakat terhadap MeToo tidak hanya diberikan oleh perempuan, tetapi juga didukung oleh laki-laki sebanyak 42%. Selain itu, Gerakan #MeToo mendapat dukungan dari Partai Demokrat sebanyak 70 persen dan Partai Republik sebanyak 22 persen, serta delapan persen yang menyatakan tidak mendukung dan tidak menentang

atau netral (Brown, 2022). Mengacu pada jumlah dukungan masyarakat terhadap MeToo, 34 persen memberikan tanggapan yang berfokus pada kesadaran akan kekerasan seksual dan kebutuhan kesetaraan terhadap perempuan.

4.2.3 Perubahan Konstruksi Sosial Masyarakat

Perubahan konstruksi sosial mengenai cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, media massa berperan besar dalam membingkai informasi dan menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Pembingkaian ini terlah merubah pemahaman dan persepsi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa kekerasan seksual adalah aib mampu diubah melalui dorongan dari Gerakan MeToo. Melalui interaksi pemberdayaan dan dukungan kepada para penyintas kekerasan seksual, konstruksi sosial di masyarakat dapat berubah (Jureller, 2020). Adanya perubahan cara pandang tersebut, mempengaruhi tindakan dan proses interaksi individu dengan lingkungan sosial (Vinney, 2019). Mengacu pada Gerakan MeToo, banyak perubahan terjadi pasca meningkatnya pengikut MeToo yang kemudian mempengaruhi lingkungan masyarakat, terutama di tempat kerja. Pekerja menjadi sadar bahwa tindak kekerasan harus dilaporkan dan penyintas berhak mendapat perlindungan. Selain itu, kebijakan mengenai tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja juga lebih diperhatikan. Sebelumnya, banyak penyintas yang merasa takut untuk melapor karena adanya kontrak kerja, pelaku yang merupakan atasan atau petinggi para penyintas kekerasan seksual, dan rasa takut akan intimidasi sosial. Bentuk intimidasi sosial bisa berwujud tindakan yang mampu merusak reputasi penyintas melalui persebaran informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, sejak Gerakan MeToo semakin meluas pada tahun 2017, pelaku kekerasan seksual di tempat kerja lebih memungkinkan untuk dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang dilaporkan oleh penyintas (Savage, 2023).

Gerakan MeToo berhasil menarik partisipasi masyarakat untuk membantu para penyintas kekerasan seksual, salah satunya melalui bantuan donasi. Adapun lembaga

yang memberi bantuan dana seperti *New York Women's Foundation, Google, Gucci, HBO, Time's Up Legal Defense Fund,* dan donatur lainnya (MeToo, Impact Report 2019, 2020). *Time's Up Legal Defense Fund* memberikan bantuan dana untuk mendukung dan membantu individu yang mengalami pelecehan seksual untuk melakukan proses hukum. Sejak berdiri pada tahun 2018, *Time's Up* mengumpulkan sebanyak lebih dari dua puluh empat juta dollar dan menghubungkan 3.677 orang dengan pengacara (data 2019) untuk melakukan tindakan hukum (North, 2019). Melalui bantuan-bantuan tersebut, Gerakan MeToo menjadi gerakan yang memiliki kekuatan dan mampu untuk terus mengupayakan pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual. Bantuan donasi ini ditujukan untuk membantu para penyintas yang mengalami kesulitan dalam proses pemulihan pasca-trauma melalui Gerakan MeToo.

4.3 Advokasi Kebijakan Gerakan MeToo di Amerika Serikat

Era globalisasi saat ini mendorong demokrasi sebagai agenda dalam membentuk strategi kebijakan yang lebih efektif bagi masyarakat, salah satunya melalui upaya advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis, yang dilakukan oleh suatu organisasi atau koalisi untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan publik mengenai suatu kepentingan tertentu melalui pendekatan yang berfokus pada mempengaruhi keputusan kebijakan publik (Young & Quinn, 2012). Dalam buku tersebut, advokasi kebijakan didefinisikan sebagai proses negoisasi dan mediasi dialog. Proses tersebut dilakukan melalui pengaruh jaringan dan pemimpin opini, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan ide, bukti, dan proposal ajuan suatu organisasi atau koalisi.

Dalam mempengaruhi kebijakan, MeToo melakukan beberapa advokasi. Mengacu pada definisi advokasi kebijakan menurut Young dan Quinn, Gerakan MeToo melakukan upaya advokasi untuk mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat melalui berbagai bentuk strategi. Sebagian besar strategi-strategi yang dilakukan MeToo merupakan pendekatan diri secara keseluruhan (wholeself approach). Melalui strategi ini, MeToo melakukan kampanye, seminar, edukasi,

serta bantuan kepada para penyintas. MeToo mengampanyekan pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang kemudian mengupayakan perubahan kebijakan mengenai penangan kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tidak kuat melindungi para penyintas. Gerakan MeToo menargetkan masyarakat untuk lebih sadar akan masalah kekerasan seksual yang masih terus terjadi dan lemahnya penegakkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, MeToo membentuk kerangka (*framework*) sebagai strategi dalam memperluas cakupan gerakan.

Gerakan MeToo berhasil menjangkau banyak orang melalui media sosial. Pada tahun 2017, Gerakan MeToo mendapatkan perhatian publik melalui penggunaan tanda tagar #MeToo yang dipublikasi oleh lebih dari 12 juta orang di 24 jam pertama (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Kekuatan gerakan ini memberi keberanian kepada para individu yang pernah mengalami kasus kekerasan untuk berani berbagi kisahnya, dan membantu meringankan trauma para penyintas lainnya dengan menyadarkan bahwa mereka tidak sendiri. Gerakan MeToo mengampanyekan bahwa kekerasan seksual tidak selalu mengacu pada hubungan seksual ataupun gender, melainkan kekuatan (power) yang dipaksakan kepada korban kekerasan. MeToo menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya paksaan oleh orang yang memiliki kekuatan lebih daripada korbannya. Kekuatan pelaku bisa meliputi dalam beberapa aspek seperti bentuk dominasi yang dimiliki oleh pelaku seperti kekuatan fisik, struktur kekuasaan, posisi jabatan, dan status sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, gerakan ini juga bertujuan untuk membantu para penyintas sembuh dari rasa takut dan traumanya.

Konsep *framing* yang digunakan oleh MeToo mempengaruhi pemahaman masyarakat. Mengacu pada definisi Goffman, Teori Pembingkaian Sosial Media (*Framing Media Social Theory*), Gerakan MeToo melakukan *framing* sebagai interpretasi skema yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mampu mengidentifikasi kejahatan berbasis gender (Goffman, 1974). Dalam proses mencapai tujuan gerakan, MeToo menerapkan ketiga peran *framing* yaitu *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing* sebagai berikut: (Benford & Snow, 2023)

a. Diagnostic Framing

Dalam tahap *diagnostic framing*, Gerakan MeToo memperluas kampanye gerakan kepada masyarakat mengenai masalah kekerasan seksual yang terjadi melalui sosial media. Melalui penggunaan tanda tagar (#) MeToo, gerakan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait kesadaran akan masalah kekerasan seksual yang masih terus terjadi. Efektivitas pengaruh Gerakan MeToo meluas karena didukung dengan penggunaan tanda tagar (#) MeToo di sosial media, sehingga mempermudah masyarakat untuk ikut bergabung. Gerakan MeToo mengemas informasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa tidak seorangpun pantas mengalami kekerasan seksual dan sekaligus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan dan meminta pertolongan. Mengacu pada peran *diagnostic framing*, kekerasan seksual terus terjadi karena lemahnya peran pemerintah dalam menangani kasus dan tingkat kejahatan di masyarakat yang masih terus berlangsung (Benford & Snow, 2023).

b. Prognostic Framing

Pasca meningkatnya kesadaran masyarakat (community awareness), MeToo melakukan penawaran alternatif solusi untuk menghadapi dan mengatasi masalah kekerasan seksual untuk masyarakat (prognostic framing). Salah satunya ialah penyediaan layanan website yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan bantuan (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Setelah mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan lembaga nasional maupun internasional, MeToo membentuk berbagai program yang membantu para penyintas kekerasan seksual untuk pulih dari trauma, seperti Community Healing Circles, Survivor Leadership Training, Survivor Healing Series, dan lainnya (MeToo, More Than A Hashtag: 2020 & 2021 Annual Report, 2022). Melalui Gerakan MeToo, masyarakat semakin berani karena mendapat

dukungan dari banyak pihak untuk melawan pelaku kekerasan seksual yang kemudian berhasil mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Mengacu pada kesadaran dan perubahan dalam masyarakat, Gerakan MeToo berperan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat melalui kampanye, seminar dan edukasi gerakan.

c. Motivational Framing

Gerakan MeToo terus memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat. Setelah bertahun-tahun melakukan kampanye advokasi tentang kekerasan seksual, MeToo masih terus berlangsung sampai saat ini yang didukung oleh masyarakat secara global. Pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang sebelumnya merasa takut dan malu, sudah berubah menjadi dukungan satu sama lain dengan memberikan motivasi. Dalam *MeToo Movement*, para penyintas didukung dan mendukung satu sama lain seperti mengucapkan "I will not be shamed, I did nothing wrong."—"Saya tidak akan malu, saya tidak salah." dan seperti "We hear you, we believe you"—"Kami dengar kamu, kami percaya kamu" (MeToo, Explore Healing, 2023). Beberapa frasa yang digunakan oleh Gerakan MeToo tersebut menginterpretasikan motivasi untuk mendukung para penyintas yang berusaha untuk pulih dari traumanya dan mendapatkan keadilan hukum serta menekankan bahwa para penyintas tidak sendiri melewati masa sulit tersebut. Dukungan yang diberikan oleh para penyintas satu sama lain membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai masalah yang harus ditangani.

Keberhasilan framing-aksi kolektif yang dilakukan oleh Gerakan MeToo dapat disebut efektif. Menurut (Benford & Snow, 2023), salah satu faktor penentu efektivitas frame adalah kredibilitas yang mencakup konsistensi frame (frame consistency), kredibiltas empiris (empirical credibility), dan kredibilitas inisiator atau articulator frame (credibility of the frame articulators or claimsmakers). Mengacu pada kampanye advokasi MeToo, Gerakan MeToo mampu disebut berhasil dalam framing-aksi

kolektif dengan memperluas tujuan dan pemahaman kepada masyarakat melalui keselarasan antara keyakinan, klaim, dan tindakan gerakan (frame consistency). Keselarasan ini mengacu pada kampanye advokasi Gerakan MeToo mengenai kekerasan seksual dengan faktual yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Gerakan MeToo mampu mengemas data informasi yang sesuai dengan fakta terkait masalah kekerasan seksual yang terjadi (empirical credibility). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, Gerakan MeToo mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang berpengaruh (influental people) seperti aktris, dan politisi (North, 2019). Tidak hanya itu, Gerakan MeToo juga berhasil mendapatkan dukungan baik dari lembaga nasional maupun lembaga internasional (credibility of the frame articulators or claimsmakers) seperti United States Commission on Civil Rights (USCCR) (USCCR, 2020) dan UN Women (Women, 2020).

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakatnya, Amerika Serikat mempertimbangkan kesadaran masyarakat untuk memperhitungkan masalah yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan hal ini Pemerintah Amerika Serikat mengakomodir isu-isu kekerasan seksual di masyarakat.Dorongan ini merupakan bagian dari upaya gerakan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terkait pentingnya kesadaran akan masalah kekerasan seksual. Efektivitas framing yang berhasil dilakukan oleh Gerakan MeToo menghasilkan kemajuan signifikan, baik bagi masyarakat maupun Gerakan MeToo sendiri. Salah satu indikator kemajuan bagi masyarakat adalah masyarakat sudah berani untuk melaporkan tindak kejahatan dan menuntut perlindungan. Sedangkan kemajuan bagi Gerakan MeToo adalah berhasilnya perubahan konstruksi sosial mengenai kekerasan seksual di tengah masyarakat yang kemudian mampu mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Banyak organisasi dan lembaga nasional yang memberi dukungan kepada Gerakan MeToo melalui berbagai bantuan sebagai bentuk strategi untuk mencapai tujuan gerakan, seperti publikasi media (media publications), kerjasama (partnership), pendekatan komunitas

(community approach), dan jaringan global (global network) (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, MeToo mendapatkan bantuan dari lembaga sebagai pendukung gerakan.⁶

4.3.1 Publikasi media (media publications)

Pemahaman publik mengenai kekerasan seksual harus diberikan untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat bahwa tindak kejahatan tersebut harus diatasi. Sebagai gerakan sosial baru, publikasi media merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Gerakan MeToo untuk mengedukasi dan menyadarkan dunia dalam menanggapi dan mengatasi kekerasan seksual. Melalui ekspansi digital, gerakan ini mampu meningkatkan kapasitas jangkauan untuk menyembuhkan dan melatih kepemimpinan melalui program-program sekaligus membangun komunitas yang lebih baik lagi. Untuk mencapai jangkauan yang lebih luas, gerakan melakukan publikasi media melalui berbagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau komunitas.

Tarana Burke selaku pencetus Gerakan MeToo juga ikut andil secara langsung dalam melakukan publikasi informasi. Pada 2018, Tarana Burke membahas mengenai Gerakan MeToo di konferensi TEDWomen dengan memberi pesan dan edukasi kepada generasi muda mengenai kekerasan seksual (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Konferensi tersebut berhasil mendapatkan perhatian masyarakat dengan jumlah sebanyak dua juta penayangan. Selain itu, pada tahun 2019 Tarana Burke mengikuti wawancara di Majalah *Playboy*, salah satu majalah dewasa terkenal di Amerika Serikat, untuk membicarakan dan mengedukasi pemahaman sehat mengenai hubungan seksual dan persetujuan kedua pihak (MeToo, Explore Healing, 2023).

4.3.2 Kerjasama (partnership)

Advokasi Gerakan MeToo memiliki motivasi untuk memperluas aliansi dengan tujuan menguatkan perhatian publik dan pemerintah. Pada 15 Oktober 2019, tepat dua tahun

_

⁶ Lihat 4.2.3

sejak viralnya #MeToo, gerakan ini memperluas aliansi untuk meningkatkan dukungan dan atensi publik dan pemerintah melalui penggunaan #MeTooVoter yang bekerjasama dengan *National Domestic Workers Alliance*, *the National Women's Law Center*, dan *Justice for Migrant Women*. Penggunaan #MeTooVoter ini mengampanyekan tuntutan kepada pemimpin politik sebagai pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan untuk memberikan solusi nyata dalam mencegah dan menghentikan kekerasan seksual. Pada 20 November 2019, petisi tersebut mendapatkan dukungan lebih dari 60 tanda tangan organisasi nasional (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Melalui petisi tersebut, para aktivis gerakan menuliskan surat terbuka yang disampaikan kepada para kandidat Presiden Amerika Serikat yang akan mengikuti pemilu 2020 untuk memperhatikan masalah kekerasan seksual di masyarakat. Tujuan ditulisnya petisi tersebut ialah untuk mendapatkan perhatian dari calon presiden Amerika Serikat dan memberikan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah isu krusial nasional yang berhak mendapatkan respon dari lembaga politik nasional.

Gerakan MeToo melakukan kerjasama dengan *Deutsch Agency*, salah satu agensi iklan di New York dan Los Angeles, pada tahun 2019 untuk memproduksi *'Survivor Story Series'*. Kerjasama ini tidak hanya berlandaskan *partnership*, melainkan juga sebagai bentuk strategi publikasi gerakan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperbanyak bentuk pengemasan atau pembingkaian informasi mengenai kekerasan seksual untuk disampaikan kepada masyarakat. Program tersebut merupakan rangkaian dari cerita pengalaman para penyintas kekerasan seksual yang ditayangkan di acara *Sundance Film Festival*, salah satu acara industri film terbesar di Amerika Serikat. Video tersebut mendapatkan penghargaan dan tersebar luas di berbagai platform media sosial (MeToo, Impact Report 2019, 2020).

4.3.3 Pendekatan komunitas (*community approach*)

Tarana Burke melakukan ekspansi jangkauan melalui pendekatan dengan masyarakat langsung, salah satunya adalah mengunjungi kampus-kampus. Sejak tahun 2018 hingga 2019, Tarana Burke sudah mengunjungi 150 kampus di Amerika Serikat yang

secara signifikan berdampak kepada lingkungan akademik dalam menangani masalah kekerasan seksual (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Gerakan MeToo menyebutkan bahwa masalah kekerasan seksual di masyarakat akan berhenti apabila edukasi secara menyeluruh dimulai dari generasi muda. Tarana Burke juga membantu lingkungan akademik dengan memberikan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

4.3.4 Jaringan global (global network)

Seiring banyaknya atensi publik terhadap advokasi gerakan, MeToo berhasil melakukan ekspansi advokasi gerakan secara global. Di tahun 2018, Tarana Burke diundang oleh Women Deliver, salah satu advokasi global, untuk bergabung di Konferensi Women Deliver di Vancouver, Kanada pada tahun 2019 (MeToo, Impact Report 2019, 2020). Konferensi ini terdiri dari 165 negara yang diikuti oleh kepala negara, anggota parlemen, akademisi, dan aktivis. Melalui topik "Advocating for Women's Rights in the Age of #MeToo", Gerakan MeToo menegaskan maksud dan sudut pandang gerakan, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan gerakan yang mengupayakan perubahan dan solusi dari negara. Selain itu, konferensi ini juga menyadarkan bahwa untuk mencari solusi, negara harus mengenali masalah yang terjadi secara jelas untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian. Meskipun konferensi ini memfokuskan topik pada perempuan, keterlibatan laki-laki juga diperlukan dalam diskusi masalah.

Dalam rangka memperluas jaringan global, Gerakan MeToo juga meluncurkan official website yang menyediakan layanan publik secara online. Peluncuran website ini bertujuan untuk memperluas cakupan gerakan. Melalui platform tersebut, MeToo mengharapkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau dan meminta pertolongan. MeToo memanfaatkan jangkauan yang semakin luas untuk berkomunikasi langsung dengan para penyintas melalui kampanye elektronik dan melakukan korespondensi satu-per-satu untuk mengetahui siapa saja yang

menghubungi MeToo (MeToo, More Than A Hashtag: 2020 & 2021 Annual Report, 2022).

4.4 Pengaruh Gerakan MeToo terhadap Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual

4.4.1 Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Amerika Serikat Advokasi kampanye Gerakan MeToo mengenai kekerasan seksual berhasil mempengaruhi lembaga pemerintah Amerika Serikat. Pada April 2020, United States Commission on Civil Rights (USCCR) mengeluarkan laporan pengarahan yang berjudul Federal #MeToo: Examining Sexual Harassment in Government Workplace. Laporan ini ditujukan kepada presiden yang menjabat yaitu Presiden Donald J. Trump dan Wakil Presiden Mike Pence melalui Letter of Transmittal. Laporan tersebut mencakup pemeriksaan USCCR terhadap EEOC dalam upaya penegakan hukum untuk melawan pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintah federal Amerika Serikat (USCCR, 2020). USCCR menyatakan bahwa upaya untuk menekan tindakan kekerasan seksual di tempat kerja harus dimulai dari lingkungan kerja terbesar yaitu lingkungan kerja Pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi contoh kepada lingkungan kerja lainnya. Laporan tinjauan USCCR mencakup frekuensi dugaan dan klaim adanya kekerasan, rekomendasi-rekomendasi yang didedikasikan untuk mencegah dan memperbaiki masalah kekerasan, dan dampak serta efisiensi upaya penegakan peraturan. Dalam laporan tersebut, komisi juga melakukan evaluasi praktik pelecehan seksual tingkat lembaga seperti Departemen Pemerintahan Amerika Serikat dan Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA).

Gerakan MeToo mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja melalui laporan USCCR. Laporan *Federal #MeToo: Examining Sexual Harassment in Government Workplace* menjadi salah satu dari delapan bagian laporan USCCR: *Performance and Accountability Report (PAR) for Fiscal Year 2020* (USCCR, 2020). Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa mayoritas komisi USCCR menyetujui rekomendasi dari EEOC yaitu kewajiban melaksanakan pelatihan anti-pelecehan yang

spesifik, jelas, dan berlaku untuk semua level karyawan di lingkungan kerja. EEOC memberikan panduan untuk terus menyebarluaskan kebijakan dan praktik pelecehan seksual yang konsisten dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja. Mengacu pada hal tersebut, badan-badan federal harus mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, seperti melarang pelaku mendapatkan promosi dan penghargaan kinerja, serta merangkul dan melatih karyawan terkait intervensi *bystander effect*.

Amerika Serikat memberikan perluasan perlindungan kepada para pekerja pada tahun 2018. Didorong oleh meningkatnya kesadaran masayarakat dalam menuntut keadilan dan perlindungan kepada lembaga pemerintah terkait tindak kejahatan kekerasan seksual. Sebelumnya, sebagian besar undang-undang Amerika Serikat tidak melindungi pekerja independen seperti asisten rumah tangga, petani, supir, wiraswasta, dan pekerja lainnya yang non-karyawan. Para pekerja independen tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila mereka mengalami pelecehan selama bekerja. Namun pada tahun 2018, New York melakukan ekspansi perluasan undang-undang pelecehan seksual untuk melindungi para pekerja independen dan meningkatkan perlindungan bagi para pekerja domestik pada tahun 2019 (North, 2019).

Advokasi Gerakan MeToo merupakan salah satu faktor pendorong dalam memperluas cakupan Undang-Undang Federal yang sebelumnya dianggap tidak cukup menangani kasus tindak kejahatan. Di tahun 2021, Kongres Amerika Serikat memperkenalkan kembali undang-undang *The Bringing an End to Harassment by Enhancing Accountability and Rejecting Discrimination* (BE HEARD) atau The BE HEARD Act kepada *House of Representatives* dan *U.S Senate* yang mendapatkan dukungan dari 22 senator dan 73 *Representatives*. Undang-undang tersebut memperluas Undang-Undang federal yang sebelumnya tidak mencakup secara keseluruhan mengenai pelecehan di tempat kerja dan bentuk diskriminasi lainnya. Rancangan Undang Undang atau RUU ini akan mencakup semua pekerja, terlepas dari tempat kerjanya, seperti pekerja magang, sukarelawan, dan pekerja independen lainnya. Selain itu, RUU ini juga akan

menindak diskriminasi yang melanggar hukum di tempat kerja, seperti diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender (Center, 2021).

Penanganan kekerasan seksual didukung oleh pemerintah dengan memberlakukan kebijakan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, pemerintah sudah menginisiasi kebijakan. RUU *The BE HEARD Act* melarang pemberi kerja untuk melakukan perjanjian kontrak dengan pekerja yang berisi perjanjian kerahasiaan atau NDA tertentu, dan melarang perjanjian arbitrase apabila ada masalah tertentu. Melalui RUU tersebut, Amerika Serikat menetapkan program hibah yaitu membangun sistem advokasi hukum di negara bagian untuk melindungi hak-hak pekerja. RUU ini juga mewajibkan EEOC untuk memberikan pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk membentuk kelompok pencegahan pelecehan di lingkungan kerja (CONGRESS.GOV, 2021).

4.4.2 Penanganan Kekerasan Seksual

Di Amerika Serikat, kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti adanya perjanjian kontrak kerja, rasa takut akan dihakimi dan dikucilkan, adanya intimidasi atau ancaman, perjanjian kerahasiaan (nondisclosure agreement) atau disebut sebagai NDA, dan lainnya. Perjanjian kerahasiaan atau NDA adalah kontrak langsung sebuah hubungan profesional yang mengikat secara hukum. Melalui NDA, pihak-pihak yang setuju menandatangani perjanjian dilarang untuk menyebarkan segala bentuk informasi internal kepada pihak lain. Perjanjian ini akan tetap berlaku secara hukum meskipun pihak-pihak yang terikat sudah tidak bekerja sama lagi.

Kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan NDA di Amerika Serikat sering terjadi. Data menunjukan bahwa satu dari tiga pekerja di lingkungan kerja Amerika Serikat terikat oleh NDA (Lobel, 2018). Sebagai contoh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein kepada banyak perempuan menjadi salah satu kasus terbesar di Amerika Serikat. Tindakan Weinstein dianggap sebagai bentuk kekuasaan

yang memotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan diikuti dengan ancaman intimidasi terhadap korban. Harvey Weinstein adalah salah satu produser industri hiburan terkenal di Amerika Serikat yang aktif sejak tahun 1979 (Staff, 2020). Pada tahun 2017, banyak aktor dan aktris yang mulai melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Weinstein. Para penyintas melaporkan bahwa Weinstein melakukan berbagai bentuk tindakan seksual non konsensual dengan mengancam karir para penyintas. Dalam hal tersebut, penyintas tidak mampu menolak karena akan mempengaruhi kehidupan pekerjaannya. Selain itu, kebijakan NDA yang disepakati melarang para penyintas untuk melaporkan hal-hal yang terjadi selama bekerja bersama. Perjanjian ini melarang penyebaran informasi kepada teman, keluarga, dokter dan pihak lainnya, kecuali pihak tersebut bersedia juga untuk menandatangani NDA (BBC, 2023).

Advokasi kampanye Gerakan MeToo berhasil mendorong para penyintas yang selama ini tidak mampu bicara dan melapor kepada pihak berwajib menjadi berani bicara dan melapor. Salah satunya bisa dilihat pada kasus Zelda Perkins. Pada Oktober 2017, Zelda Perkins melaporkan tindakan Weinstein terkait pengalamannya dilecehkan selama bekerja sebagai asisten Weinstein. Tindakan Weinstein kepada Perkin didukung oleh adanya dominasi kekuasaan dan ancaman yang membuat Perkin tidak mampu melapor atau meminta pertolongan. Perkin merahasiakan hal tersebut selama hampir dua puluh tahun karena diikat oleh kebijakan NDA (BBC, 2023). Keberanian Perkin dilandasi oleh dorongan dari Gerakan MeToo untuk mampu berbagi cerita pengalamannya kepada publik. Dorongan tersebut mengubah cara pandang Perkin yang termotivasi untuk ikut bergabung dengan masyarakat dalam menghentikan kekerasan seksual. Tuntutan yang ditujukan kepada Weinstein selama lima tahun terakhir menghasilkan keputusan bahwa Weinstein bersalah dan dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2023 (BBC, 2023).

Sejak kasus Harvey Weinstein, masyarakat berpendapat bahwa adanya NDA hanya akan melindungi para pelaku kejahatan di masa mendatang. Sebagai masyarakat warga

negara Inggris, Zelda Perkins memicu Parlemen inggris untuk melarang adanya NDA yang menutupi kasus pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja (Addley & Sabbagh, 2018). Mengacu pada kebijakan tersebut, California menjadi negara bagian pertama yang membatasi penggunaan NDA yang melibatkan kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi gender yang ditandatangani oleh Jerry Brown. Kebijakan ini terinspirasi dari Gerakan #MeToo dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019 (Phillips, 2018).

Sangat mungkin Advokasi Gerakan MeToo memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi RUU mengenai kebijakan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Pada Februari 2022, Kongres Amerika Serikat memberikan persetujuan untuk RUU yang menjamin bahwa orang yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dapat menuntut pelaku melalui jalur hukum. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi penyintas yang dipaksa untuk diam dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual melalui arbitrase. Hal tersebut menjadi penghalang penyintas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan biasanya akan menguntungkan tempat kerja yang menjaga agar tuduhan pelanggaran tidak dipublikasikan (Press, 2022).

NDA menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan para penyintas tidak bisa bicara dan melapor. Namun, meningkatnya atensi dan kesadaran publik melalui advokasi kampanye Gerakan MeToo yang kemudian mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual. Pemberlakuan kebijakan mengenai pembatasan penggunaan NDA mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Pada Desember 2022, Presiden Joe Biden menandatangani RUU yang membatasi penggunaan perjanjian kerahasiaan (nondisclosure agreements) yang menghalangi penyintas pelecehan seksual untuk bicara. Berdasarkan beberapa kejadian, banyak pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian kerahasiaan yang melarang penyintas untuk menceritakan pengalamannya. Oleh karena itu, Joe Biden memberikan persetujuan hak kepada penyintas pelecehan di tempat kerja untuk mencari perlindungan melalui pengadilan. Perubahan ini salah satu pengaruh Gerakan MeToo

yang mereformasi kebijakan di tempat kerja paling signifikan dalam sejarah Amerika menurut Senator Amerika Serikat, Kristen Gillbrand (2022).

Advokasi MeToo sedikit banyak mendorong perubahan Undang-Undang, yang pada akhirnya memiliki pengaruh pada perubahan kebijakan Amerika Serikat. Perubahan kebijakan mengenai penanganan kekerasan seksual juga diajukan oleh *United States Department of Education* melalui usulan perubahan Regulasi Title IX. Title IX menyatakan bahwa tidak seorang pun akan dikecualikan, ditolak, atau didiskriminasi yang berpartisipasi dengan program kegiatan pendidikan yang menerima bantuan dana dari Pemerintah Federal (Education, Title IX and Sex Discrimination, 2021). Pada tahun 2020, *U.S Department of Education* merilis mengenai usulan perubahan peraturan sekolah dasar hingga universitas di Amerika Serikat yang tercantum pada Title IX. Amandemen yang diusulkan ialah memberikan perlindungan bagi siswa yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi seksual. Melalui amandemen ini juga diharapkan menjadi perlindungan bagi para penyintas yang tidak dapat dilindungi karena lemahnya peraturan yang berlaku sebelumnya. Melalui peraturan yang diusulkan ini akan memajukan pemerataan kesempatan pendidikan untuk setiap perempuan dalam mencapai pendidikan tinggi di Amerika Serikat.

Peraturan yang diusulkan akan mengembangkan tujuan Title IX untuk memastikan bahwa tidak akan ada orang yang mengalami diskriminasi jenis kelamin dan kekerasan seksual dalam pendidikan. Peraturan ini akan memperkuat perlindungan bagi siswa LGBTQI+ (lesbian, gay, bisexual, queer, intersex, dan lainnya) yang menghadapi diskriminasi berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual mereka. Melalui peraturan ini akan mewajibkan semua siswa mendapatkan dukungan yang tepat dalam mengakses semua aspek pendidikan. Mengacu pada perubahan peraturan yang diusulkan ini, U.S Department of Education mewajibkan prosedur sekolah untuk mengatur pengaduan diskriminasi dan kekerasan seksual. Saat ini, usulan perubahan Regulasi Title IX masih dalam proses yang terbuka untuk menerima komentar publik dan menanggapi segala bentuk tanggapan masyarakat.

Advokasi kampanye Gerakan MeToo berhasil mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Sebagai GSB yang menjalankan organisasi tanpa bertemu langsung, Gerakan MeToo sukses mendapatkan perhatian public mengenai isu kontemporernya yaitu hak-hak dan kesetaraan. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan penanganan kekerasan seksual (Press, 2022). Berdasarkan data yang sudah diapaparkan sebelumnya, advokasi Gerakan MeToo berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan penanganan kekerasan seksual terutama di lingkungan kerja. Beberapa kebijakan yang dipengaruhi oleh MeToo adalah kebijakan yang membatasi penggunaan NDA (Nondisclosure Agreement) dan kebijakan yang memberikan perlindungan secara penuh bagi para penyintas kekerasan seksual (Press, 2022).



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai isu kontemporer yaitu hak asasi manusia (human rights) dan kesetaraan (equality) yang di upayakan melalui Gerakan MeToo. Isu kontemporer dalam kampanye advokasi Gerakan MeToo membahas mengenai masalah kekerasan seksual yang menjadi salah satu perhatian utama negara-negara dunia. Dalam menganalisis fenomena Gerakan MeToo, peneliti menggunakan teori Feminisme Liberal (liberal feminism), Gerakan Sosial Baru (New Social Movement), dan Pembingkaian (Framing) sebagai alat untuk analisis dan menentukan argument. Gerakan MeToo memberikan pengaruh pada progres perubahan dalam kehidupan sosial dan kebijakan politik di Amerika Serikat. Dalam kehidupan sosial, MeToo berhasil mempengaruhi konstruksi sosial masyarakat terkait pemahaman mengenai kekerasan seksual. Sedangkan dalam politik, MeToo memberikan progress dalam mempengaruhi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat melalui kampanye advokasi gerakan. Advokasi yang dilakukan oleh Gerakan MeToo terdiri dari berbagai bentuk strategi, seperti kampanye dan framing media social. Melalui media sosial, MeToo berhasil memperluas jangkauan publik dan mengampanyekan pencegahan dan upaya menghentikan kekerasan seksual di masyarakat. Strategi advokasi MeToo diawali dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak seorangpun berhak mengalami kekerasan seksual, yang kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga, individu, dan organisasi nasional. Hal ini membuktikan bahwa masalah kekerasan seksual adalah salah satu urgensi negara yang membutuhkan penanganan jelas dan tepat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat.

Pembahasan mengenai Gerakan MeToo dan kekerasan seksual selaras dengan kampanye advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat.

Kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat mengalami beberapa pembaharuan yang dipengaruhi oleh meluasnya eksistensi Gerakan MeToo. Perubahan paling signifikan terjadi di lingkungan kerja Amerika Serikat, di bawah pengawasan EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) dan USCCR (United States Commission on Civil Rights). Sebelumnya, para penyintas kekerasan seksual merasa takut untuk melaporkan kasus karena trauma dan khawatir akan pandangan orang lain. Hal ini menjadikan kekerasan seksual terus berlangsung karena rendahnya kesadaran dan kekuatan masyarakat dalam menghadapi masalah. Namun, dengan hadirnya Gerakan MeToo, sudut pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual mulai berubah. Masyarakat mulai bersatu pendapat bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

5.2 Saran

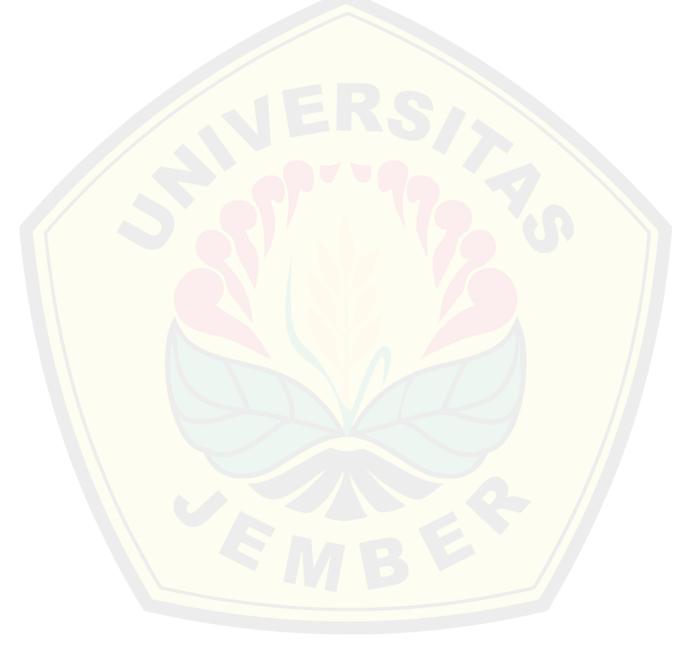
a. Saran Akademis

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, pembahasan berfokus pada advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual oleh Gerakan MeToo di Amerika Serikat. Peneliti membatasi pembahasan advokasi kebijakan selama lima tahun terakhir yaitu 2017 hingga 2022. Berdasarkan substansi penelitian, terdapat beberapa perubahan regulasi kebijakan yang masih dalam proses dan belum disahkan, salah satunya ialah Regulasi Title IX oleh *United States Department of Education*. Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk membahas mengenai keberlanjutan Gerakan MeToo dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan penanganan kekerasan seksual di Amerika Serikat.

b. Saran Praktis

Saran praktis dari peneliti untuk masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pemangku kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kekerasan seksual. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih sadar bahwa tidak seorangpun berhak mengalami kekerasan seksual. Dalam mencegah tindak kekerasan

yang terus-menerus, masyarakat harus bersama mendukung para penyintas untuk mendapatkan keadilan hukum, karena tindak kekerasan seksual akan tetap berlangsung apabila kebijakan penanganan tidak kuat dan jelas dalam menangani masalah. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada pengambil keputusan (decision maker) untuk membentuk ruang sepemahaman dengan lingkungan masyarakat dalam menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat.



DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Addley, E., & Sabbagh, D. (2018). 'British #MeToo scandal' puts non-disclosure agreements in spotlight. United Kingdom: The Guardian.
- Aquillah, K. (2021). Gerakan Sosial dan Pembuatan Kebijakan (Studi Kasus: Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Amandemen The California Fair Employment and Housing Act tahun 2017). Depok: Repository UI.
- Bachri, B. S. (2010, 5 6). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62. Retrieved from Universitas Brawijaya: http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melaluitriangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf
- Batool, S. S. (2019). Social Movements; A Case Study of MeToo Movement. Academia Edu.
- Batta, D. A., & Baghwar, M. (2021). American Dream and American Society: A Study of F. Scott. Fitzgerald's The Great Gatsby, Arthur Miller's The Death of Salesman and Earnest Hemingway's The Old Man and The Sea. 2.
- BBC. (2023). Harvey Weinstein timeline: How the scandal has unfolded. London: BBC.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2023, 5 5). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment (2000). Retrieved from JSTOR: https://www.jstor.org/stable/223459
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge.* USA: Penguin Books.
- Bernadeth, O. (2019). *Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Ketidakadilan Berbasis Gender di Industri Film Hollywood.* Bandung: Repository Unpar.
- Brown, A. (2022). *More Than Twice as Many Americans Support Than Oppose the #MeToo Movement*. Washington D.C: Pew Research Center.
- Carroll, N. (2020). Tarana Burke on the power of empathy, the building block of the Me Too movement. USA TODAY.
- CDC, U. (2023). *Violence Prevention*. Retrieved from Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/fastfact.html
- Center, N. W. (2021). Congress Reintroduce BE HEARD Act that Covers All Workers,
 Regardless of Size of Workplace. Washington D.C: National Women's Law Center.

- CONGRESS.GOV. (2021). Bringing an End to Harassment by Enhancing Accountability and Rejecting Discrimination in the Workplace Act or the BE HEARD in the Workplace Act. U.S Congress Gov.
- Dewi, F. R. (2019). Pengaruh Gerakan #MeToo terhadap Perubahan Kebijakan tentang Pelecehan Seksual di Amerika Serikat Tahun 2017-2019. Yogyakarta: Repository UII.
- Education, U. D. (2020). *Civil Rights Data Collection: Sexual Violence in K12 Schools.*Washington, DC: U.S Department of Education Office for Civil Rights.
- Education, U. D. (2021). *Title IX and Sex Discrimination*. Washington D.C: U.S Department of Education.
- EEOC, O. o. (2022). Sexual Harassment in Our Nation's Workplaces. Washington: Office of Enterprise Data and Analytics (OEDA) Data Highlight No. 2 U.S Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).
- Elindawati, R. (2021). Gerakan #MeToo sebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 17-27.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication: Autumn 1993*, 52.
- Flynn, S. I. (2009). New Social Movement Theory. Sociology Reference Guide, 88-99.
- Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row: Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Gordon, S. (2023). *The #MeToo Movement: History, Sexual Assault Statistics, Impact.* Verywell Mind's.
- Guy-Evans, O. (2023). *Liberal Feminism: Definition, Theory & Examples*. London: Simply Scholar.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasunuma, L. K.-Y. (2019). #MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou. *Journal of Women, Politics & Policy*, 97-111.
- ILO. (2023). Violence and harassment at work has affected more than one in five people.

 Retrieved from International Labour Organization:

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_863177/lang-en/index.htm

- Johansson, H., & Scaramuzzino, R. W. (2019). SOCIAL MOVEMENTS AND INTEREST GROUPS COMPARED How organisational type matters for explaining Swedish organisations' advocacy strategies. *The Open Journal of Sociopolitical Studies*, 353-381.
- Jureller, H. (2020). Socially Constructing the #MeToo Movement in The New York Times. Faculty Sponsor: Amy McClure, 1-63.
- Levy, R., & Mattson, M. (2022). The Effects of Social Movements: Evidence from #MeToo. 1-97.
- Lobel, O. (2018). *NDAs Are Out of Control. Here's What Needs to Change.* Harvard Business Review.
- Lorber, J. (1997). *The Variety of Feminisms and their Contributions to Gender Equality.*Universitat Oldenburg.
- Mahrudi, I. (2022). Hidup bersama berbagai dalam Masyarakat yang Beragam: Pengalaman Bangsa Amerika dengan Multikulturalisme. *Jurnal Alternatif*, 17-25.
- *Me Too: Our Work.* (2023). Retrieved from MeToo Movement Web site: https://metoomvmt.org/
- MeToo. (2020). Impact Report 2019. United States: MeToo Movement.
- MeToo. (2022). More Than A Hashtag: 2020 & 2021 Annual Report. MeToo.
- MeToo. (2023, 4 8). *Explore Healing*. Retrieved from MeToo Movement: https://metoomvmt.org/
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3)*. California: SAGE Publications, Inc.
- Modrek, S., & Chakalov, B. (2019). The #MeToo Movement in United States: Text Analysis of Early Twitter Conversation. *Journal of Medical Internet Research*, 1-14.
- Nations, U. (2023, May 5). *Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls*. Retrieved from United Nations: Sustainable Development Goals: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
- Nations, U. (2023, May 5). *Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet: Gender Equality*. Retrieved from United Nations: https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality
- North, A. (2019). *7 Positive Changes that Have Come from the #MeToo Movement.* Washington, D.C: VOXMEDIA.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER 57

- Pflum, M. (2018). A Year Ago, Alyssa Milano Started a Conversation About #MeToo. These Women Replied. New York: NBC News Digital.
- Phillips, F. (2018). California Employers To Face Raft Of New #MeToo Laws. Fisher Phillips.
- Press, A. (2022). *US Congress approves sexual harassment bill in #MeToo milestone.* The Guardian.
- RAINN. (2023). Victims of Sexual Violence: Statistics. United States: RAINN.
- Savage, M. (2023). Did Me Too change the workplace for Gen Z? London: BBC.
- Savirani, A. (2020). *Tanya Politik: Gerakan Sosial (Part 1/2)*. Department of Politics and Government-Universitas Gadjah Mada (Youtube).
- Sharma, R. (2015). *Gender Inequality in India: Causes and Remedies*. Candigarh: International Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMSH).
- Shukla, S., & Singh, P. P. (2020). #MeToo Movement: Influence of Social Media Engangement on Intention to Control Sexual Harassment Against Women. *Journal of Content, Community & Communication, Vol.* 12.
- Staff, R. (2020). TIMELINE-Key events of the rise and fall of Harvey Weinstein. Reuters.
- Strategy, N. S. (n.d.). *Sexual Violence: An Introduction*. Halifax: Break the Silence: Speak Up About Sexual Violence.
- Study.com. (2015, July 12). Study.com: Liberal Feminism: Definition & Theory. Retrieved from Study.com: Liberal Feminism: Definition & Theory:

 https://study.com/academy/lesson/liberal-feminism-definition-theory-quiz.html.
- Sudaryono, D. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing.
- Sumanjeet, S. (2017). The State of Gender Inequality in India. New Delhi: De Gruyter.
- U.S Department of Education, O. f. (2020). 2017-18 Civil Rights Data Collection: "Sexual Violence in K12 Schools". U.S Department of Education, Office for Civil Rights.
- USCCR. (2020). Federal #MeToo: Examining Sexual Harassment in Governement Workplace.

 Retrieved from United States Commission on Civil Rights:

 https://www.usccr.gov/files/pubs/2020/04-01-Federal-Me-Too.pdf
- Vinney, C. (2019). Social Constructionism Definition and Examples. America: ThoughtCo.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER 58

- Women, U. (2020). #MeToo: Headline from a global movement. Retrieved from United Nations Women: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/brief-metoo-headlines-from-a-global-movement
- Wu, W. (2021). Framing #MeToo Movement in China A Content Analysis of China Women's New Coverage. *University of South Florida*.
- Young, E., & Quinn, L. (2012). *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*. Budapest, Hungary: Open Society Foundations.
- Zhafarina, A. N., Anditya, A. W., & Anisah, L. N. (2022). Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Mahasiswa sebagai Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 497-520.

